



***REMORSE TO HEAL THE OLD WOUND: ANALISIS POLITICAL  
APOLOGY JERMAN UNTUK GENOSIDA DI NAMIBIA***

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1  
Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Akma Ikasari**

**14050119120018**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Remorse to Heal the Old Wound: Analisis Political Apology Jerman Untuk Genosida di Namibia*

Nama Penyusun: Akma Ikasari

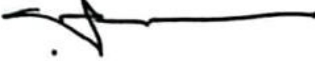
NIM : 14050119120018

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Semarang, 26 Juni 2023

Dekan



Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.  
NIP. 196408271990011001

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.  
NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing :

1. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D


()

2. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.

()

Dosen Penguji Skripsi :

1. Anjani Tri Fahtarini S.IP., M.A

()

2. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D

()

3. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Sudarto, 8  
Tembalang Semarang Kode Pos 502  
Tel./Faks. (024) 746054  
www.fisip.undip.ac.id | email: fisip@undip.ac

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA\*)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Akma Ikasari
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14050119120018
3. Tempat / Tanggal Lahir : Panutan, 21 Februari 2001
4. Departemen / Program Studi : Hubungan Internasional
5. Alamat : Panutan, Kec. Pagelaran, Kab Pringsewu, Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

*Remorse to Heal the Old Wound: Analisis Political Apology Jerman Untuk Genosida di Namibia*

Adalah benar-benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

1. Ika Riswanti Puranti, Amd.Ak., S.H., M.H., Ph.D

2. Marten Hanura, SIP., M.P.S

Semarang, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,

Akma Ikasari

NIM. 14050119120018

Ketua Program Studi

Dr. Dra. Reni Windiani, M.S.  
NIP. 196509031989022001

## HALAMAN MOTTO

*Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim.*

*Be patient and strong, someday this pain will be useful to you.*

Ovid

## KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Deretan kata ini tidak akan cukup untuk menyampaikan betapa bersyukur penulis akan Allah SWT yang selalu hadir dalam situasi apapun. Anugerah yang diberikan oleh Allah SWT selalu melimpah di setiap sudut kehidupan hingga penulis berkesempatan untuk hidup dan beraktivitas dalam keadaan sehat. Berkat mengalirnya rahmat, hidayah, serta ridho-Nya, penulis mampu bertahan dan tidak patah semangat untuk terus belajar hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REMORSE TO HEAL THE OLD WOUND: ANALISIS POLITICAL APOLOGY JERMAN UNTUK GENOSIDA DI NAMIBIA”**.

Shalawat dan salam juga penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan yang selalu menginspirasi penulis untuk terus berjuang dan menuntut ilmu.

Skripsi ini tidak akan dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, motivasi, dan kehadiran sosok-sosok luarbiasa di bawah ini:

1. Bapak Kasdi, Ibu Karneli, Ibu Khotimah, Aprilia Gumilang, dan Akbar Nur Alim sebagai keluarga yang memberikan kasih sayang tak terbatas serta tidak kenal lelah untuk mendampingi setiap langkah penulis.
2. Mba Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, wawasan, dan dukungan yang menginspirasi penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Marten Hanura, S.I.P., M.P.S sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan pembelajaran, ilmu pengetahuan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Mas Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. sebagai Dosen Wali yang sungguh inspiratif dan suportif sejak awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
5. Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, MS selaku Kepala Departemen Hubungan Internasional yang telah memberikan pengetahuan, wawasan, serta membantu segala hal yang berkaitan dengan Departemen Hubungan Internasional.
6. Pak Drs. Tri Cahyo Utomo, M.A. yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, wawasan, dan dukungan yang memotivasi penulis untuk selalu berusaha menjadi mahasiswa yang baik, terus belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Mba Anjani Fatharini, S.I.P., M.A. selaku dosen penguji skripsi, yang telah memberikan wawasan, ilmu, dan dukungan yang bermanfaat dalam perjalanan penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Diponegoro.
8. Mas Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A. yang telah banyak memberikan bantuan terkait konversi mata kuliah program IISMA dan memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat.
9. Mas Satwika Paramasatya, S.I.P., yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang *eye opening* dan bermanfaat.
10. Mba Shary Charlotte, S.I.P., M.A. yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat inspiratif.
11. Mas Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A, yang dengan penuh semangat telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat.
12. Ibu Dr. Drs. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si, yang dengan penuh ketelitian telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat.
13. Mas Andi Akhmad Basith Dir, S.I.P., M.IS, yang dengan penuh sabar telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat.
14. Mba Palupi Anggraheni, S.I.P., M.A yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat.
15. Segenap tim International Office FISIP dan Undip yang telah membantu segala urusan pendaftaran IISMA.
16. Seluruh Dosen Hubungan Internasional FISIP Undip dan Civitas

Akademika Universitas Diponegoro yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya demi kelancaran aktivitas pembelajaran di Universitas Diponegoro.

17. Nada Izzata Kamila, sahabat terbaik yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk setiap kata-kata, tindakan, dan waktu yang sangat berharga. Semoga suatu hari nanti mimpi-mimpi kita dapat terwujud.
18. Jerry Mich Adem, *an angel in a human form who is always there no matter what. Thank you for everything you have done. I would not make it this far without your presence and support. Let's make our dreams come true. I will see you on top of the world.*
19. Teman-teman yang kehadirannya selalu menghangatkan suasana hati: Wendiyanti, Eka Maria Hasibuan, Khoiri Amana Robbi, Siti Humaira Aseja Laso, Eduard Nababan, Tri Suci Handayani S, Dara Delina Azzahra, Tassa Tantiana, Thessa Sagita Mardiah, Dewi Khofifah, Rafta Windy Sinaga, Khansa Allya, Ulan Hidayah, dan Nur Roudloh Azzahra, serta keluarga besar mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Angkatan 2019
20. Teman-teman yang penulis temui selama program IISMA 2022: Alexandra Catherine Gunawan, Dara Nabila Salsabyala, Hanna Mustika Lailita, Ammirul Hasyim Abdullah, Jade Jones, María José Pérez Contreras, Mariángeles Martínez González, Lola Chamorro Guerrero, Caroline Mallory, Lucie Hills, dan Kathryn Smith, serta keluarga besar IISMA Granada, terima kasih sudah membuat pengalaman IISMA penulis menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
21. Mario Ordóñez Menz dan Abdullah Burak Arslan, sahabat pena yang senantiasa memberikan dukungan di waktu-waktu yang sulit dilalui.
22. Kakak-kakak dan teman-teman SMA Negeri 1 Pringsewu yang sangat inspiratif dan telah memotivasi penulis hingga dapat menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro: Kak Naufal Alif, Euis Kartika Sari, Yoga Prastiyo, dan Imam Khoerullah.

23. Dan semua orang yang sempat bertemu, menghabiskan waktu, berbincang, dan menjalin pertemanan dengan penulis. Setiap interaksi yang pernah terjadi membantu penulis untuk menjadi diri penulis hari ini.

Salvador Dalí pernah berkata bahwa manusia seharusnya tidak perlu mengejar kesempurnaan sebab tidak akan ada manusia yang mampu meraihnya. Begitu pula dengan skripsi ini. Meski tidak terlepas dari kekurangan, tulisan ini adalah sebuah karya ilmiah yang tidak akan mungkin ada tanpa dedikasi banyak pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam proses pengerjaannya, khususnya Mba Ika dan Mas Marten selaku dosen pembimbing. Penulis berharap hal-hal yang tertulis di halaman-halaman berikutnya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini.



## ABSTRAK

Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan internasional. Seiring dengan perkembangan perjuangan penegakan hak asasi manusia di era modern, belum banyak negara di dunia yang merespons kejahatan-kejahatan genosida yang pernah terjadi di era kolonialisme. Akan tetapi, pada tahun 2021 Jerman melalui representasi Menteri Luar Negeri Heiko Maas menyampaikan *political apology* yang diikuti dengan *wiedergutmachung* atau reparasi sebagai respons dari genosida di Namibia yang terjadi antara 1904 – 1908. Kebijakan ini berkaitan dengan visi Jerman untuk memperbaiki masa depan dan menghargai martabat serta hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses kebijakan *political apology* Jerman terhadap kasus genosida di Namibia. Penelitian ini disusun menggunakan konsep *political apology* beserta indikator-indikator yang dikemukakan oleh Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner. Hasil penelitian ini adalah *political apology* Jerman pada tahun 2021 dilakukan dengan reparasi sebagai perwujudan komitmen Jerman, sehingga telah sesuai dengan indikator-indikator *political apology*. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab Jerman atas kejahatan genosida di Namibia atau *to heal the old wound* serta untuk membentuk masa depan yang jauh dari pelanggaran hak asasi manusia. *Political apology* dan reparasi Jerman yang direspons secara positif dari pihak Namibia menunjukkan bahwa kebijakan *political apology* berhasil untuk memperbaiki masa depan, khususnya dalam bingkai hubungan bilateral Jerman dengan Namibia.

Keywords: Jerman, *political apology*, reparasi, genosida, Namibia.

## **ABSTRACT**

*The crime of genocide is one of the international crimes. Although, alongside the development and the enforcement of human rights, there are not many nation-states that deliberately respond to the crimes that happened in the colonialism era, namely genocide. However, in 2021 Heiko Maas as the official representative of Germany announced a political apology and reparation regarding the genocide in Namibia between 1904 - 1908. This policy is related to Germany's vision to create a better future and respect human dignity as well as human rights. This study aims to describe the process of Germany's political apology for Namibia in 2021. This study is using the concept of political apology and utilizes the indicators of political apology by Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, and Renate Strassner. Further, the result of this study is that the practice of Germany's political apology in 2021 is followed by wiedergutmachung (reparation) to show Germany's will to take responsibility towards the genocide in Namibia or in another words, to heal the old wound as well as to create a better future with the absence of human rights violations. The positive response from Namibia to Germany's political apology shows that Germany's political apology and reparation are effective to create a brighter future, especially in terms of the bilateral relations between Germany and Namibia.*

*Keywords: Germany, political apology, reparation, genocide, Namibia.*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	7
1.5.1 Konsep Political Apology.....	7
1.6 Operasionalisasi Konsep.....	16
1.6.1 Definisi Konseptual.....	16
1.6.2 Definisi Operasional.....	18
1.7 Argumen Penelitian.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	19
1.8.1 Tipe Penelitian.....	19
1.8.2 Objek Penelitian.....	20
1.8.3 Subjek Penelitian.....	20
1.8.4 Jenis Data.....	20
1.8.5 Sumber Data.....	21
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data.....	22
1.9 Sitematika Penulisan.....	22
<b>BAB II RESPONS JERMAN DALAM GENOSIDA DI NAMIBIA</b> .....	<b>25</b>
2.1 Kronologis Genosida di Namibia.....	26
2.2 Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia dari Waktu ke Waktu.....	31
2.2.1 <i>Political Apology</i> Tahun 2004.....	31
2.2.2 Pengembalian Tengkorak Korban Genosida di Namibia.....	33
2.2.3 <i>Political Apology</i> dan Reparasi 2021.....	35

<b>BAB III ANALISIS <i>POLITICAL APOLOGY</i> JERMAN DALAM KASUS GENOSIDA DI NAMIBIA .....</b>	<b>38</b>
3.1 Analisis <i>Political Apology</i> Jerman 2021 Menggunakan Indikator-indikator <i>Political Apology</i> .....	38
3.2 Proses <i>Political Apology</i> Jerman Tahun 2021 .....	45
3.3 Respons Terhadap <i>Political Apology</i> Jerman dalam Kasus Genosida Herero dan Nama .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
Lampiran 1 .....	68
Lampiran 2 .....	70
Lampiran 3 .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Namibia Tahun 1904 .....	27
Gambar 2. 2 Alur Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Negara dengan Jumlah <i>Political Apology</i> .....	3
Tabel 1.2 Indikator <i>politcal apology</i> .....	10
Tabel 2.1 Bentuk Kejahatan Genosida Jerman.....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di abad ke-21, hak asasi manusia menjadi sorotan internasional pasca kejahatan, peperangan, perbudakan, dan kekejaman yang marak terjadi di era kolonialisme (Sarkin, 2009). Oleh sebab itu, perjuangan penegakan hak asasi manusia yang sebelumnya kerap dilanggar justru menjadi fokus pedoman moral di zaman kontemporer meskipun praktiknya masih terbilang tidak mudah (Sarkin, 2009; Sikkink, 2017).

Dalam ilmu Hubungan Internasional, kejahatan genosida dipandang sebagai tindak kejahatan skala internasional sebab sejak Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan kejahatan genosida sebagai salah satu kejahatan internasional dengan ditetapkannya Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bloxham & Moses, 2010). Kejahatan genosida juga diatur dalam Statuta Roma pada Bagian 2 Artikel 6 tentang Genosida. Dengan status sebagai salah satu kejahatan internasional. Dengan ini, kejahatan genosida adalah tindak kejahatan yang dikecam seluruh dunia. Beberapa kejahatan genosida yang pernah terjadi diantaranya adalah genosida di Rwanda, Darfur, Bosnia & Herzegovina, serta holocaust (The Genocide Education Project, 2014).

Akan tetapi, sebab tragedi holocaust memiliki dampak yang menggemparkan dunia, belum banyak yang mengetahui bahwa holocaust bukanlah kejahatan genosida pertama Jerman (Daase et al., 2017). Genosida

di Namibia terjadi antara tahun 1904 hingga 1908 (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Shelton, 2005; Euronews, 2021) dan merupakan kejahatan genosida pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman ketika menduduki wilayah Namibia.

Sejak tahun 1884, Namibia berada di bawah pimpinan Jerman dengan nama resmi *Deutsch-Südwestafrika* atau *German South West Africa* (Madley, 2005). Namibia adalah negara dengan berbagai kelompok etnis, dua diantaranya adalah etnis Herero dan Nama yang menempati Namibia bagian selatan (Shelton, 2005). Sejak 1884, Jerman tidak hanya menjadi penguasa di Namibia, tetapi juga melakukan genosida antara tahun 1904 hingga 1908 dan membunuh sekitar 50.000 sampai 100.000 Herero dan sekitar 10.000 – 20.000 Nama (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Shelton, 2005; Euronews, 2021).

Terlepas dari kejahatan genosida dan holocaust yang pernah terjadi, Jerman adalah negara pertama yang mengambil kebijakan *political apology* pasca Perang Dunia Kedua (Calermajer, 2009). Penelitian dari Marieke Zoodma dan Juliette Schaafsma (2022) membuktikan bahwa Jerman menduduki posisi ke dua sebagai negara yang paling banyak melakukan *political apology* untuk kejahatan yang pernah diperbuat di era sebelum hak asasi manusia menjadi sorotan internasional sesuai dengan tabel 1.1 (48 & Schaafsma, 2022).



**Tabel 1.1 Daftar Negara dengan Jumlah *Political Apology* pada tahun 2021**

<b>Negara</b>	<b>Jumlah <i>political apology</i></b>
Jepang	57
Jerman	28
Amerika Serikat	21
Inggris	19
Kanada	15
Belanda	10
Republik Korea Selatan	10
Selandia Baru	10
Norwegia	8
Guatemala	7

*Sumber: telah diolah kembali dari Zoodsma & Schaafsma, 2022.*

Di dunia yang dipenuhi dengan perjuangan penegakan hak asasi manusia, ketika kita melihat ke belakang dan menyaksikan banyak catatan sejarah mengenai praktik kejam, seperti kerja paksa, perbudakan, bahkan kejahatan genosida, tentunya fakta tersebut menuai perdebatan (Bloxham & Moses, 2010). Dengan adanya perjuangan penegakan hak asasi manusia di zaman kontemporer, tindak pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan genosida, perbudakan, penyiksaan, dan sejenisnya terbilang sudah

tidak marak terjadi sebagaimana pada era kolonialisme. Meski demikian, bukan berarti catatan sejarah mengenai kejahatan genosida hilang begitu saja dan dapat dinormalisasi. Sebaliknya, masa lampau memiliki pengaruh terhadap masa kini dan masa depan, sehingga diperlukan respons terhadap kejahatan genosida.

Faulkner dalam buku Jeremy Sarkin (2009) menyatakan bahwa “*The past is not dead, it is not even past.*” Kalimat tersebut menggambarkan relasi antara masa lalu, masa kini, dengan masa depan yang selalu berkesinambungan. Dalam hal ini, pasca runtuhnya Tembok Berlin, masyarakat internasional tidak serta-merta menyambut Jerman dengan pelukan hangat, sebab peristiwa yang terjadi di masa lampau memiliki dampak yang berkelanjutan, termasuk kejahatan genosida (Sarkin, 2009).

Dengan demikian, pada akhirnya dibutuhkan respons untuk menanggapi kontradiksi antara hak asasi manusia yang diperjuangkan saat ini dengan kondisi masyarakat internasional di era sebelumnya yang diwarnai dengan perbudakan, penyiksaan, peperangan, dan kejahatan genosida (Mihai & Thaler, 2014). Dengan adanya kesinambungan antara masa lalu dengan masa kini serta masa depan, maka dengan berkembangnya perjuangan penegakan hak asasi manusia membuktikan diperlukannya aksi untuk *dealing with the past*, seperti *political apology*.

113 tahun pasca terjadinya genosida di Namibia, pemerintah Jerman yang diwakili oleh Heiko Maas selaku Menteri Luar Negeri Jerman menyampaikan permintaan maaf atas nama kewajiban moral dan harapan akan masa depan yang lebih baik pada Mei 2021 lalu ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021; Hambira & Gleckman-Krut, 2021). Permintaan maaf tersebut diikuti dengan pemberian dana untuk program reparasi dan pembangunan sebesar 1.1 milyar euro ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021; BBC, 2021; CNN, 2021).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman ini cukup mengejutkan sebab permintaan maaf akan kejahatan yang terjadi di era kolonialisme masih terbilang jarang terjadi (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019). Hal ini tentunya menuai perdebatan sebagaimana tergambar dalam judul-judul berita internasional seperti “*Germany Agrees to Officially Recognize Colonial-Era Killings in Namibia as Genocide*” pada Mei 2021 lalu melalui media berita online Euronews (Kennedy, 2021).

Dari media lain yaitu BBC News, dikabarkan bahwa “*Germany officially recognises colonial-era Namibia genocide*” pada Mei 2021 (BBC, 2021). Serta di situs berita CNN yang juga diterbitkan pada bulan Mei 2021 dengan judul “*Germany will pay Namibia \$1.3bn as it formally recognizes colonial-era genocide*” (Schmidt, Engels, Busari, & McKenzie, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 sebagai respons terhadap genosida di Namibia—*The forgotten genocide*—yang terjadi antara tahun 1904 sampai dengan 1908.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bagaimana praktik kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 kepada Namibia atas genosida Herero dan Nama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kasus genosida di Namibia yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respons Jerman di era kontemporer terhadap kasus genosida etnis Herero dan etnis Nama yang terjadi pada 1904 hingga 1908.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik *political apology* dan reparasi Jerman dalam kasus genosida Herero dan Nama menggunakan konsep *political apology*.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam analisis kasus perkembangan hubungan bilateral antara Jerman dengan Namibia dalam bingkai kasus genosida Herero dan Nama.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Memberikan kontribusi di dalam ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai kajian tentang *political apology* dan reparasi genosida.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam menyusun kebijakan luar negeri suatu negara terkait *political apology* dan reparasi genosida.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Konsep Political Apology**

*Political apology* atau permintaan maaf politik merupakan permintaan maaf resmi yang dinyatakan oleh perwakilan dari suatu negara atau korporasi, ataupun pihak terorganisir kepada pihak yang menjadi korban maupun keturunan dari pihak korban dari suatu tindak ketidakadilan yang diperbuat oleh anggota suatu kelompok tertentu (Thompson, 2005).

Alice MacLachlan dalam *On the Uses and Abuses of Political Apology* (2014) menyatakan bahwa *political apology* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Permintaan maaf resmi yang disampaikan dan diterima oleh kelompok yang terorganisir dan memiliki konstitusi serta disampaikan oleh

representatif yang memiliki mandat, contohnya seperti negara, organisasi politik, ataupun kelompok etnis;

2. Permintaan maaf antara pihak-pihak baik individu ataupun kelompok yang memiliki hubungan politik (MacLachlan, 2014).

Selanjutnya, menurut Sanderijn Cels (2015), *political apology* adalah suatu tindakan yang mencerminkan perbaikan moral dan diekspresikan melalui pernyataan formal dari pihak yang bersalah dan bertujuan untuk merekognisi eksistensi moral ataupun makna psikologis dari pihak yang terlibat (Cels, 2015).

Christopher Daase, Stefan Engert, dan Judith Renner (2017) dalam buku *The Importance of Being Sorry: Apology and Reconciliation in International Relations* menjelaskan tentang tiga jenis respon terhadap kejahatan yang terjadi di masa lampau oleh pihak pelaku kejahatan, yaitu pengelakan, dalih atau alasan, dan permintaan maaf ataupun *apology* dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Indikator *Political Apology***

	Pengelakan ( <i>denial</i> )	Menghindar ( <i>excuses</i> )	<i>Political Apology</i>
Identifikasi tindak kejahatan	-/+	+	+
Pengakuan akan keterlibatan dalam tindak	-/+	+	+

kejahatan			
Mengekspresikan rasa bersalah dan penyesalan	-/+	+	+
Terdapat komitmen untuk bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang diperbuat	-	-/+	+
Terdapat komitmen untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa	-	-/+	+
Terdapat permohonan maaf kepada korban	-	-	+
Secara aktif berusaha menebus kesalahan (dapat berupa kompensasi)	-	-	+

Keterangan:

+ = ada

- = tidak ada

*Sumber: Telah diolah kembali dari Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017.*

Permintaan maaf atau *apology* idealnya mencakup tujuh komponen sesuai dengan tabel di halaman sebelumnya, sedangkan dalam respons berupa *denial* dan *excuses* tidak ada komitmen untuk tidak mengulang kejahatan yang sama, ataupun permintaan maaf kepada korban yang menderita dari kejahatan yang terjadi, kedua respons tersebut juga tentunya tidak disertai dengan upaya penebusan seperti kompensasi atau sejenisnya (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

*Political apology* merupakan permintaan maaf resmi yang dinyatakan oleh perwakilan dari suatu negara atau korporasi, ataupun pihak terorganisir kepada pihak yang menjadi korban maupun keturunan dari pihak korban dari suatu tindak ketidakadilan yang diperbuat oleh anggota suatu kelompok tertentu (Thompson, 2005).

Tak hanya itu, adanya kompensasi atau reparasi juga esensial dalam *political apology* (Zoodsma & Schaafsma, 2022). Menurut Roy Brooks (1999), permintaan maaf resmi tidak dapat dikatakan cukup tulus apabila tidak diikuti dengan program reparasi. Meski demikian, pada praktiknya, kompleksitas *political apology* tertuang dalam reparasi yang tidak diikuti dengan permintaan maaf resmi dari pihak yang bersalah (Brooks, 1999).

Berdasarkan penelitian Michael R. Marrus (2007), salah satu komponen penting dalam *political apology* adalah bagaimana pihak yang bersalah mengekspresikan adanya kewajiban moral dan rasa



tanggungjawab dalam praktiknya. Oleh sebab itu terdapat kompleksitas di dalam permintaan maaf, sebab sejatinya tindakan ini harus mencerminkan adanya rasa bersalah dan penyesalan akan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, menunjukkan adanya rasa tanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat, serta mengekspresikan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama (Marrus, 2007). Dengan ini, reparasi diperlukan untuk menunjukkan adanya komitmen untuk bertindak lebih bijak dan baik di masa mendatang.

Dalam praktiknya, *political apology* bukanlah hal yang mudah sebab didalamnya terdapat tanggung jawab untuk berubah dan aktor yang melakukan gestur tersebut harus sanggup berkomitmen dalam rangka mencapai dan mempertahankan setiap tindakan agar konsisten dengan norma dan prinsip yang layak (Thompson, 2005). Tanpa adanya kesanggupan dan konsistensi tersebut maka *political apology* tidak dapat dikatakan tulus atau *genuine* (Thompson, 2005).

Kössler (2015) berargumen bahwa *political apology* akan lebih baik jika dalam praktiknya diiringi dengan gestur badan, seperti berlutut dan lain sebagainya. Stephen Winter (2014) berargumen bahwa *political apology* menggambarkan adanya perubahan yang dapat berupa konstruksi identitas baru ataupun pertanda bahwa terdapat perubahan identitas (Winter, 2014). Sebagai tindakan yang mencerminkan kekuatan moral, *political apology* adalah kebijakan

yang tercermin dalam *wiedergutmachung* Jerman (Mihai & Thaler, 2014).

Dengan demikian, sejatinya *political apology* adalah tindakan yang tulus selama dalam praktiknya terdapat pengakuan akan terjadinya suatu tindak kejahatan yang diikuti dengan rasa bersalah, serta pernyataan untuk tidak mengulang tindak kejahatan tersebut (Thaler, 2011).

Janna Thompson (2012) berargumen bahwa penduduk suatu negara memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki masa depan dan menjaga komitmen untuk memperbaiki ketidakadilan yang pernah diperbuat oleh generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, *political apology* bersifat intergenerasional yang dapat menentukan arah suatu negara dalam membentuk karakter dan identitas negara tersebut (Thompson, 2012). Dengan ini, *political apology* menunjukkan bahwa suatu negara menghargai dan menunjung nilai-nilai hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, dan toleransi sehingga pada akhirnya *political apology* dapat mengantarkan suatu negara untuk membentuk masa depan yang berorientasikan pada penegakan hak asasi manusia dan perdamaian (Schaafsma, Zoodsma, & Sagherian-Dickey, 2021).

Penelitian terkait hubungan bilateral Jerman dan Namibia yang berfokus pada genosida di Namibia dan bantuan dari Jerman telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian Vilho Amukwaya Shigwedha dalam buku Jean-Marc Dreyfus dan Élisabeth

Anstett yang berjudul *Human Remains in Society: Curation and Exhibition In The Aftermath Of Genocide and Mass-Violence* (2016) bab delapan yang berjudul *The Return of Herero and Nama Bones From Germany: The Victims' Struggle For Recognition and Recurring Genocide Memories in Namibia* yang berfokus pada sisa-sisa tengkorak etnis Herero dan Nama yang dahulunya dibawa ke Jerman sebagai bahan eksperimen (Shigwedha, 2016). Tengkorak-tengkorak tersebut dikembalikan ke Namibia pada tahun 2008, 2011, dan 2012 (Shigwedha, 2016; Kössler, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Reinhart Kössler yang menjelaskan tentang perkembangan hubungan Jerman-Namibia pasca genosida secara detail dalam penelitiannya yang berjudul *Namibia and Germany: Negotiating the Past* (2015). Kössler (2015) menyatakan bahwa kasus Jerman dan Namibia belum dapat disimpulkan sebab praktik yang melibatkan masa lalu cenderung lebih sulit untuk diselesaikan, dalam hal ini genosida di Namibia sebagai kejahatan skala internasional tidak hanya meninggalkan luka bagi pihak keturunan korban, tetapi juga memberikan tanda tanya besar di sisi keturunan pelaku untuk kembali membangun martabat sebagai kelompok manusia yang beradab (Kössler, 2015).

Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017) melakukan penelitian tentang *political apology* dan rekonsiliasi, Stefan Engert dalam bab 6 yang

berjudul *Germany – Namibia: The Belated Apology to the Herero* membahas tentang perkembangan kasus genosida di Namibia dan bagaimana respon Jerman dari waktu ke waktu terhadap isu genosida di Namibia. Pada akhirnya Stefan Engert (2017) menyimpulkan bahwa *political apology* dari Jerman untuk Namibia terjadi tanpa adanya tekanan berarti dari pihak domestic maupun internasional, meskipun belum diikuti dengan reparasi sebagai elemen yang komplementer dalam *political apology* (Engert, 2017).

Terlepas dari reparasi, Stefan Engert menyimpulkan bahwa Jerman sebagai pionir dari *wiedergutmachungspolitik* atau politik untuk menyembuhkan luka lama dengan reparasi telah berkembang menjadi negara yang berani untuk meghadapi gelapnya masa lalu Jerman dengan baik dinilai dari progres di kasus genosida Heero dan Nama yang lebih cepat daripada perkembangan kasus Jerman dengan Israel (Engert, 2017).

Penelitian berjudul *Reactive Remembrance: The Political Struggle Over Apologies and Reparations Between Germany and Namibia for the Herero Genocide* oleh Franziska Boehme (2020) menarik kesimpulan bahwa kasus genosida di Namibia telah mencapai progress di mana pihak Jerman yang semula cenderung pasif menjadi makin aktif dari waktu ke waktu, meski demikian kasus ini belum mencapai penutup yang layak sebab belum ada permintaan maaf ataupun reparasi dari pihak pemerintah Jerman (Boehme, 2020). Pada

akhirnya kasus ini belum diketahui secara pasti akan berakhir seperti apa, tetapi Jerman setidaknya menunjukkan adanya peran aktif yang mungkin akan semakin meningkat kedepannya (Boehme, 2020).

Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu diselesaikan sebelum dikeluarkannya berita resmi dari pemerintah Jerman terkait persetujuan Jerman untuk merekognisi genosida di Namibia yang diikuti dengan permintaan maaf dan pendanaan sebesar 1.1 milyar euro pada 2021 ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Atas dasar ini, peneliti merasa perlu untuk melihat perkembangan terbaru kasus genosida di Namibia serta negosiasi antara Jerman dan Namibia yang pada akhirnya membuahkan hasil.

Berdasarkan literatur sebelumnya, penelitian ini akan berupaya mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu yang belum mencakup perkembangan terbaru dari kasus negosiasi Jerman – Namibia yang membahas tentang genosida di Namibia. Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator *political apology* yang belum pernah digunakan dalam penelitian terkait genosida di Namibia. Dengan menggunakan konsep *political apology*, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan respons Jerman di dalam bingkai kasus genosida di Namibia yang berfokus pada *political apology* Jerman pada tahun 2021 yang diikuti dengan reparasi sebesar 1.1 milyar euro.

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Definisi Konseptual

#### 1.6.1.19 *Apology* (Permintaan Maaf)

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi permintaan maaf atau *apology* dari Tavuchis yang diperoleh dari penelitian Marieke Zoodsma, Juliette Schaafsma, Thia Sagherian-Dickey, dan Jasper Friedrich (2021). Tavuchis menyampaikan bahwasanya *apology* atau permintaan maaf merupakan gestur baik verbal ataupun non-verbal yang bertujuan untuk mempercepat proses rekonsiliasi pasca terjadinya konflik (Zoodsma et al., 2021).

Kemudian, Janna Thompson (2005) menyampaikan bahwa *apology* di dalam konteks *political apology* merupakan bentuk nyata dari *remembrance* pihak pelaku mengenai kesalahan yang diperbuat. Permintaan maaf juga merupakan cara yang baik untuk menunjukkan rasa hormat terhadap catatan sejarah yang kejam. Dengan demikian, permintaan maaf di dalam hubungan internasional adalah tindakan yang lumrah diambil oleh suatu negara yang pernah berbuat ketidakadilan di masa lampau sebagai respons berbasis moralitas. Dalam hal ini, *political apology* Jerman tahun 2021 merupakan manifestasi dari permintaan maaf di dalam ranah politik oleh pemerintah Jerman sebagai respons terhadap kejahatan genosida di Namibia.

### 1.6.1.2 *Wiedergutmachung* (Reparasi atau Kompensasi)

*Wiedergutmachung* atau sepadan dengan reparasi dan kompensasi adalah pendanaan yang disediakan untuk korban tindak kejahatan dan ketidakadilan, pada awalnya diperuntukkan untuk korban Nazi Jerman, tetapi seiring berkembangnya waktu, *wiedergutmachung* (reparasi) juga diberikan kepada korban kejahatan pemerintah Jerman di era sebelum ataupun sesudah Nazi (Federal Ministry of Finance of Germany, 2018).

Menurut Dinah Shelton (2005), reparasi adalah hukuman atau konsekuensi yang harus diikuti oleh suatu negara yang telah melanggar hukum internasional (Shelton, 2005). Reparasi dapat berupa material ataupun nonmaterial selama dapat mengobati atau memulihkan kondisi korban sehingga dampak tindak kejahatan yang diperbuat tidak meninggalkan dampak yang begitu parah (Shelton, 2005).

Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017) menyampaikan bahwa reparasi adalah bentuk komitmen suatu negara yang dapat mengiringi *political apology* sebagai upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan menebus kesalahan yang pernah diperbuat (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 *Apology* (Permintaan Maaf)**

Dalam penelitian ini, *apology* yang menjadi fokus pembahasan adalah *political apology* yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman pada tahun 2021 atas nama genosida Herero dan Nama yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman—Heiko Maas ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). *Political apology* pada dasarnya mengekspresikan rasa bersalah, penyesalan, dan komitmen untuk bertindak lebih baik di masa depan (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

### **1.6.2.2 *Wiedergutmachung* (Reparasi atau Kompensasi)**

Dalam pidato Heiko Maas—Menteri Luar Negeri Jerman yang menjabat pada tahun 2021 (The Federal Government of Germany, 2023)—disampaikan bahwa Pemerintah Jerman akan memberi dukungan kepada Namibia, khususnya keturunan etnis Herero dan Nama dengan dana sebesar 1.1 milyar euro yang disusun dalam program pembangunan dan rekonstruksi ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).



## 1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penulis kemudian berargumen bahwa proses *political apology* Jerman pada tahun 2021 diikuti dengan reparasi (*wiedergutmachung*) agar dapat memperbaiki masa depan dan dapat menunjukkan bentuk komitmen Jerman yang tidak akan melakukan tindak kejahatan genosida di masa mendatang.

Sesuai dengan konsep *political apology*, kebijakan *political apology* menunjukkan tanggungjawab (Zoodsma et al., 2021) Jerman atas kejahatan genosida yang pernah terjadi di Namibia antara 1904-1908. Dengan ini, kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Jerman terkait penegakan hak asasi manusia yang tercantum di dalam Action Plan Jerman tahun 2021-2022.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini diproses dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini akan berupaya menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab rumusan masalah menggunakan instrument penelitian yang kemudian dipaparkan ke dalam narasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif sejatinya menggunakan manusia sebagai subjek utama dalam proses pengumpulan data (Moleong, 2014). Dengan demikian, penelitian ini yang membahas tentang respons Jerman terhadap genosida di

Namibia melalui *political apology* tahun 2021 sejalan dengan fokus dari metode kualitatif itu sendiri. Maka, dengan menggunakan metode kualitatif, Penulis berharap dapat menemukan data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

### **1.8.2 Objek Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan metode *desk research* dengan Jerman sebagai objek penelitian dengan informasi dan data-data yang digunakan bersumber buku, jurnal, situs resmi pemerintah, dan situs berita di internet yang diakses melalui perangkat pribadi.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini berfokus pada *political apology* Jerman di tahun 2021 dalam kasus genosida di Namibia yang terjadi pada 1904 sampai 1908.

### **1.8.4 Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi dari aktor yang terlibat langsung dalam kasus yang diteliti hingga pernyataan dari representatif negara yang terlibat yang diunggah di media sosial resminya. Selain itu, penulis turut memanfaatkan data dari studi literatur berupa buku, jurnal, dan berita dari media online.

### **1.8.5 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi kementerian luar negeri Jerman, situs resmi kementerian keuangan Jerman, dan pernyataan langsung pemerintah Jerman baik dari pidato maupun publikasi media sosialnya. Penelitian ini juga memanfaatkan data-data dari buku, jurnal, ataupun situs berita online yang berkaitan dengan kasus genosida Herero dan Nama serta negosiasi Jerman dan Namibia mengenai kasus tersebut.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *desk research* sebagai Teknik pengumpulan data yang didukung dengan teknik pengumpulan data *internet research*. Teknik studi kepustakaan didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai isu terkait yang kemudian ditelaah dan dianalisis. Sementara *internet research* didasarkan pada analisis informasi yang bersumber dari internet seperti berita dari media online ataupun artikel jurnal yang diakses melalui internet. Kedua teknik tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik negosiasi Jerman dengan Namibia terkait genosida Herero dan Nama serta *political apology* Jerman pada 2021 lalu.

### 1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode fenomenologi deskriptif. Metode fenomenologi dilaksanakan melalui proses pendeskripsian gejala-gejala dari suatu fenomena sebagaimana yang dapat diobservasi. Dalam kajian penelitian, makna ataupun esensi dari suatu fenomena dapat diamati melalui pancaindera manusia (Gill, 2020).

Edmund Husserl di dalam penelitian Michael J. Gill di dalam buku Mik-Meyer dan Järvinen (2020) menyampaikan bahwa fenomenologi deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan esensi dari suatu fenomena yang terjadi. Dengan ini, penelitian ini akan berusaha menemukan esensi dari *political apology* Jerman tahun 2021 yang diikuti dengan reparasi (*wiedergutmachung*).

## 1.9 Sitematika Penulisan

Sesuai dengan panduan penulisan skripsi Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penelitian ini akan disusun dalam empat bab dengan detail berikut ini.

Bab I adalah pendahuluan yang mencakup rancangan dan desain penelitian yang ditulis secara rinci. Pada bab ini, terdapat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas kasus genosida di Namibia dan tanggapan Jerman dari waktu ke waktu terhadap kasus tersebut.

Bab III adalah pembahasan di mana hasil dari penelitian ini akan dipaparkan secara rinci, yaitu tentang bagaimana proses kebijakan *political apology* Jerman tahun 2021 kepada Namibia dalam kasus genosida di Namibia yang dianalisis menggunakan konsep *political apology*.

Bab IV merupakan penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang ditujukan untuk kebaruan penelitian selanjutnya.

## BAB II

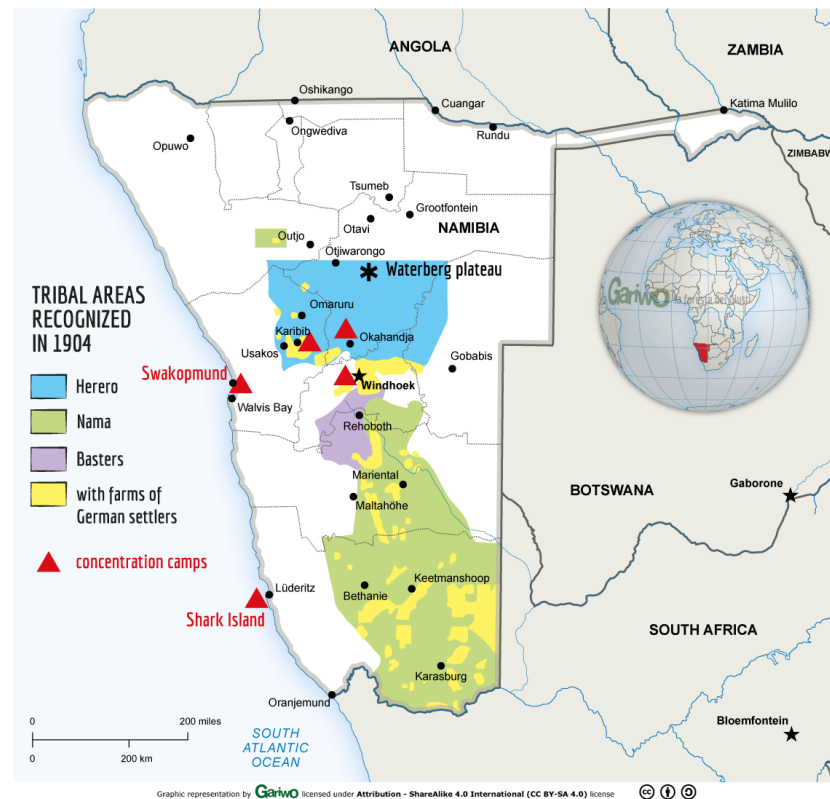
### RESPONS JERMAN DALAM GENOSIDA DI NAMIBIA

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di era kolonialisme jarang menampakkan diri di panggung internasional, seolah-olah kekejaman masa tersebut terlupakan begitu saja (Schüring, 2004). Kasus genosida terhadap di Namibia yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908 di Namibia yang dahulu berada di bawah Pemerintah Kolonial Jerman (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Boehme, 2020). Pasca Universal Declaration on Human Rights 1948 barulah isu tentang kejahatan masa lampau seperti kejahatan genosida naik ke permukaan (Kössler, 2015). Meski demikian, *political apology* masih terbilang kontroversial sebab banyak sekali negara-negara yang dahulu memegang kekuasaan di era kolonialisme yang terlibat dalam tindak kejahatan seperti perbudakan, rasisme, bahkan genosida (Boehme, 2020).

Terlepas dari kompleksnya praktik *political apology*, Mihai dan Thaler (2014) berargumen bahwa *political apology* adalah kebijakan yang penting sebagai respons terhadap kejahatan yang terjadi di masa kolonial sebab *political apology* dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan bahwa negara tersebut kontra terhadap tindak kejahatan yang sempat diperbuat—yang dalam hal ini adalah genosida (Mihal & Thaler, 2014). Di dalam bab ini, penelitian ini akan berfokus pada penjelasan mengenai kasus genosida etnis Herero dan etnis Nama diikuti dengan respons Jerman terhadap kasus tersebut.

## 2.1 Kronologis Genosida di Namibia

Kejahatan genosida ini berawal dari praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman sejak 1884 di Namibia (Kössler, 2015). Pemerintah kolonial Jerman awalnya singgah di Kawasan permukiman masyarakat Herero dan Nama dan menempatkan pasukan militernya di kedua area tersebut (Kössler, 2015). Kemudian, seiring dengan pendudukan Jerman di kedua wilayah tersebut, terdapat praktik kerja paksa, penyitaan lahan, dan praktik-praktik kejam lainnya menciptakan kemarahan dari pihak masyarakat Namibia yang kemudian melakukan perlawanan terhadap pasukan Jerman (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).



Gambar 2.1 Peta Wilayah Namibia Tahun 1904

*Sumber: Gardens of Righteous Worldwide*

Pemberontakan etnis Herero dan etnis Nama kemudian direspons oleh Pemerintah Kolonial Jerman dengan mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Jenderal Lothar von Trotha atau yang dikenal dengan *Schutztruppe* (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016). Von Trotha kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuh seluruh etnis Herero dan Nama yang berlangsung dari 1904 hingga 1908, baik dengan cara penembakan ataupun membiarkan mereka mati kelaparan dan dehidrasi (Kössler, 2015). Kedua kelompok etnis tersebut menjadi target genosida Pemerintah Kolonial Jerman sebab etnis Herero dan etnis Nama merupakan kelompok yang paling banyak melakukan perlawanan dan pemberontakan (Kössler, 2015).

Terdapat beberapa bentuk kejahatan genosida Jerman di Namibia antara tahun 1904 hingga 1908, yaitu aksi militer dengan tujuan memusnahkan kelompok etnis Herero dan Nama yang melawan kekuasaan kolonial Jerman (Kössler, 2015). Kemudian, pemerintah kolonial Jerman menempatkan etnis Herero dan Nama yang selamat di penampungan yang tidak didukung dengan sanitasi dan persediaan pokok yang menunjang (Kössler, 2015) sehingga kebanyakan dari masyarakat Herero dan Nama yang selamat pun pada akhirnya meninggal karena menderita kekurangan gizi dan kelelahan karena dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).



Terdapat narasi dari penelitian Krishnamurthy dan Tjiramanga (2020) dan Vilho Amukwaya Shigwedha (2016) bahwa korban genosida Herero dan Nama yang selamat dari pembunuhan Pemerintah Kolonial Jerman bertahan hidup dengan memakan burung mentah sebab mereka terlalu takut untuk menyalakan api. Di tenda-tenda penampungan pun etnis Herero dan Nama yang selamat tidak diperlakukan secara manusiawi, para perempuan diperkosa dan dipaksa merebus tengkorak-tengkorak korban genosida lalu menguliti tengkorak-tengkorak tersebut yang pada akhirnya dikirim oleh Pemerintah Kolonial Jerman ke Jerman untuk dijual dan dipergunakan untuk eksperimen (Krishnamurthy & Tjiramanga, 2020; Shigwedha, 2016).

**Tabel 2.1 Bentuk Kejahatan Genosida Jerman di Namibia**

<b>No.</b>	<b>Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jerman di Namibia</b>	<b>Hukum Internasional yang Dilanggar</b>
1.	Kejahatan genosida dengan korban sekitar 50.000 - 100.000 Herero dan 10.000 - 20.000 Nama	Statuta Roma artikel 6 & Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
2.	Pemeriksaan	Statuta Roma artikel 7
3.	Penyiksaan	Statuta Roma artikel 7
4.	Kerja paksa	Statuta Roma artikel 7
5.	Perbudakan	Statuta Roma artikel 7
6.	Perdagangan tengkorak korban genosida	Statuta Roma artikel 6 & Convention on the Prevention and Punishment of the Crime

		of Genocide
--	--	-------------

*Sumber: diolah kembali dari Shigwedha, 2016.*

Serangkaian praktik genosida beserta kompleksitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman di Namibia sesuai dengan tabel 2.1 kemudian diestimasikan memakan korban sekitar 50.000 hingga 100.000 Herero dan sekitar 10.000 hingga 20.000 Nama yang tentunya masuk ke dalam kategori kejahatan genosida (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Euronews, 2021). Kisaran angka tersebut setara dengan 80% masyarakat Herero dan 50% masyarakat Nama (European Center for Constitutional and Human Rights, 2020). Meski demikian, Jeremy Sarkin berargumen bahwa tanpa adanya pelaku asli dari kejahatan genosida, maka akan sulit dibuktikan tujuan murni dari kejahatan tersebut, sebab niat dibalik dilakukannya tindakan genosida hanya dapat diketahui langsung dari pencetus perintah genosida (Sarkin, 2009)—yang dalam hal ini adalah General Lothar von Trotha yang sudah meninggal.

Praktik kekejaman berupa *vernichtungsbefehl* atau perintah eksekusi yang dikeluarkan di Namibia yang berada di bawah pimpinan Jenderal Adrian Dietrich Lothar von Trotha tentunya telah melanggar hak asasi manusia berupa hak hidup (Shigwedha, 2016). Dan sebagai salah satu negara yang mengaksesi The Convention on the Prevention and Punishment on the Crime of Genocide sejak 1954, Jerman sejatinya memiliki tanggung jawab yang belum terselesaikan terkait kejahatan-kejahatan yang diperbuat

di masa lampau (Gropengießer, 2005). Meski demikian, Kössler (2015) berargumen bahwa dari perspektif psikoanalisis, menghadapi masa lalu dengan berani dan bijak dapat memberikan ketenangan walaupun yang melakukan tindak kejahatan adalah nenek moyang dari pihak Jerman yang sudah meninggal dan tidak dapat dijatuhi hukuman (Kössler, 2015).

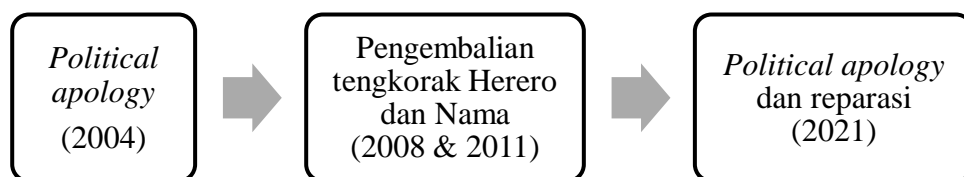
Kejahatan genosida tentunya meninggalkan luka dengan beragam dampak negatif, baik terhadap pihak korban ataupun generasi berikutnya (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019). Serangkaian bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman sesuai dengan tabel 2.1 tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghancurkan peradaban di sisi korban genosida, terlebih dengan dipergunakannya tengkorak-tengkorak korban secara manusiawi yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan (Shigwedha, 2016). Praktik kejahatan genosida yang pernah terjadi kemudian membentuk susunan masyarakat yang rentan akan kesenjangan rasial diikuti dengan lemahnya perekonomian masyarakat, rendahnya taraf hidup serta kualitas pendidikan, bahkan hingga saat ini (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Berdasarkan penelitian Nick Sprenger, Robert Rodriguez, dan Ngondi Kamaṭuka pada 2017 lalu, Kuaima Riruako—Kepala Etnis Herero—mengatakan bahwa tidak hanya genosida Herero menyebabkan kehilangan anggota keluarga dan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali sebagai kelompok masyarakat, tetapi juga generasi muda yang berhasil selamat dari fenomena tragis tersebut memiliki kecemasan dan rasa takut yang tinggi

akan masa depan sebab memiliki kisah gelap dari generasi sebelumnya (Sprenger, Rodriguez, & Kamařuka, 2017).

## 2.2 Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia dari Waktu ke Waktu

Sejak bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman berdiri menjadi satu negara yang kuat dan berani dalam menghadapi kekejaman masa lampau, hal ini ditandai dengan kompensasi Jerman yang penuh tanggung jawab kepada korban-korban Nazi (Kössler, 2015). Keberanian untuk bertanggung jawab tersebut kemudian membuka jalan bagi Pemerintah Jerman di era kontemporer untuk merekognisi dan menanggapi kekejaman-kekejaman masa lampau lainnya (Kössler, 2015).



**Gambar 2.2 Alur Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia**

### 2.2.1 *Political Apology* Tahun 2004

Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Heidemarie Wiczorek-Zeul pada kunjungannya ke Namibia menyampaikan simpatinya terhadap genosida Herero dan Nama pada 14 Agustus 2004 lalu ([www.namibia-botschaft.de](http://www.namibia-botschaft.de), 2004). Heidemarie Wiczorek-Zeul menyampaikan rasa bersalah dan komitmen untuk berbenah yang mana pada saat itu belum terdapat tekanan dari pihak manapun untuk Jerman merekognisi permasalahan tersebut, akan tetapi permintaan maaf resmi ini disampaikan oleh Heidemarie Wiczorek-Zeul (Engert, 2016).

*“We Germans accept our historical and moral responsibility and the guilt incurred by Germans at that time. And so, in the words of the Lord's Prayer that we share, I ask you to forgive us our trespasses.”* (Wieczorek-Zeul, 2004).

Permintaan maaf dalam pidato Heidemarie Wieczorek-Zeul pada 2004 berisikan rekognisi terhadap genosida Herero dan Nama oleh pemerintah Kolonial Jerman di bawah pimpinan Jenderal Lothar Von Trotha yang pada akhirnya menciptakan adanya penyesalan di pihak Jerman dan Heidemarie Wieczorek-Zeul menyatakan maaf atas nama negara Jerman yang telah berbuat kejam di era kolonialisme, akhir kata Wieczorek-Zeul menyampaikan harapan untuk dapat mencapai rekonsiliasi dengan pihak Namibia agar dapat merangkai masa depan yang lebih baik (Wieczorek-Zeul, 2004), untuk teks pidato resmi selengkapnya akan dicantumkan di lembar lampiran.

*Political apology* Jerman pada 2004 yang disampaikan oleh Heidemarie Wieczorek-Zeul menunjukkan mulai mudarnya amnesia terhadap kejahatan dan kekejaman masa kolonialisme dari pihak pemerintah Jerman, sebab belum banyak negara yang dulu memegang kekuasaan di era kolonial yang merekognisi kesalahan yang diperbuat di zaman kolonialisme, terlebih meminta maaf kepada negara yang sempat menjadi korban (Jones, 2015). Jerman kemudian secara perlahan bertransformasi menjadi donor terbesar bagi Namibia dari waktu ke waktu (Melber, 2015; Schüring, 2004).

Meski demikian, menurut Franziska Boehme (2020), permintaan maaf pada tahun 2004 ini tidak diikuti dengan aksi nyata berupa reparasi ataupun

program lain yang setara. Oleh sebab itu, meskipun pidato Heidemarie Wieczorek-Zeul berhasil menyulut semangat rekonsiliasi Jerman dalam menanggapi kejahatan di masa lampau, permintaan maaf tersebut memberikan impresi bahwa *political apology* tersebut hanyalah kalimat-kalimat belaka tanpa komitmen (Boehme, 2020).

Reinhart Kössler (2015) mengkritisi *political apology* 2004 bahwa pernyataan Heidemarie Wieczorek-Zeul masih terkesan ambigu sebab tidak ada gestur fisik yang menunjukkan penyesalan dan rasa bersalah mendalam, seperti halnya yang dilakukan oleh Willy Brandt yang berlutut di Ghetto Memorial, kota Warsawa pada tahun 1970 (Kössler, 2015).

### **2.2.2 Pengembalian Tengkorak Korban Genosida di Namibia**

Terlepas dari tulus atau tidaknya permintaan maaf pada tahun 2004, di tahun-tahun berikutnya, pemerintah Jerman dan Namibia melakukan negosiasi yang cukup intensif sejak tahun 2015 (European Center of Constitutional and Human Rights, 2021). Kemudian, pada tahun 2008, 2011, dan 2014, Pemerintah Jerman secara resmi mengembalikan tengkorak korban genosida Herero dan Nama ke Namibia (Kössler, 2015; Anstrett & Dreyfus, 2016).

Charité University Hospital pada tahun 2008 mengirim surat kepada Kedutaan Namibia atas kebersediaan institusi tersebut untuk mengembalikan tengkorak-tengkorak korban genosida di Namibia kepada negara asal (Shigwedha, 2016). Penyerahan tengkorak-tengkorak tersebut

dihadiri oleh lima puluh empat representatif dari Namibia (Shigwedha, 2016).

Proses pengembalian tengkorak korban genosida ini kemudian terjadi lagi pada 3 Oktober 2011, di mana Charité University Hospital kembali menyerahkan tengkorak korban genosida kepada Namibia, terdapat 20 buah tengkorak yang diidentifikasi sebagai tengkorak milik etnis Herero dan etnis Nama (Shigwedha, 2016). Minister of State Cornelia Piper menghadiri upacara penyerahan tengkorak tersebut dan memberikan pidato sebagai representatif dari pihak Jerman ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Cornelia Piper menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan menyampaikan bahwa Jerman mengakui adanya beban moral yang harus ditanggung oleh Jerman sebagai konsekuensi dari kekejaman genosida di Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Cornelia Piper juga turut menyampaikan harapan akan tercapainya rekonsiliasi dalam relasi Jerman-Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Naskah pidato resmi selengkapnya tercantum di lampiran 2.

Pada 4 Oktober 2011, ratusan masyarakat Namibia menyambut kedatangan tengkorak-tengkorak nenek moyang mereka di Bandar Udara Hosea Kutako. Bagi masyarakat Namibia, tengkorak-tengkorak tersebut bukan sekadar sisa peradaban manusia, melainkan bukti perjuangan pahlawan Namibia yang di kemudian hari mengantarkan Namibia kepada kemerdekaan (Faber-Jonker, 2018).

Kembalinya tengkorak-tengkorak tersebut ke Namibia secara simbolik menggambarkan adanya kemauan dari pihak Jerman untuk mengambil tanggungjawab moral atas kasus genosida Herero dan Nama (Shigwedha, 2016). Meski demikian, Henning Melber berargumen bahwa dalam upaya rekonsiliasi dan negosiasi antara Jerman dan Namibia belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang signifikan (Melber, 2020).

### **2.2.3 *Political Apology* dan Reparasi 2021**

Sejak kembalinya tengkorak-tengkorak korban genosida di Namibia, isu genosida tersebut dibicarakan oleh Pemerintah Jerman dan Namibia mulai tahun 2015 dengan Zedekia Ngavirue sebagai representatif dari Namibia dan Ruprecht Polenz sebagai representatif Jerman (Melber, 2020; [www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

Setelah menyangang status Work In Progress, pada tahun 2021 Pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselor Angela Merkel pada akhirnya mempublikasikan Press Release yang berisikan kesimpulan final dari dialog antara Jerman dan Namibia terkait genosida yang terjadi satu abad lalu. Press Release tersebut pada intinya merupakan *political apology* yang ditujukan kepada korban dan keturunan etnis Herero dan etnis Nama di Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

*Political apology* Jerman pada tahun 2021 diwakili oleh Heiko Maas, selaku Menteri Luar Negeri Jerman. Pernyataan resmi tersebut diikuti dengan *wiedergutmachung* (reparasi) sebesar 1.1 milyar euro untuk program pembangunan ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). *Political apology*



tersebut disampaikan oleh Heiko Maas pada 28 Mei 2021 melalui Press Release resmi Pemerintah Jerman dan media sosial resmi Heiko Maas (twitter.com).

Pernyataan *political apology* Jerman pada 2021 berisikan permintaan maaf kepada korban genosida di Namibia, rekognisi terhadap kejahatan genosida di Namibia, tujuan dari pihak Jerman untuk mencapai rekonsiliasi, dan harapan Jerman untuk dapat menciptakan masa depan yang lebih baik—khususnya dalam lingkup hubungan bilateral antara Jerman dengan Namibia, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dua.

Argumen Franziska Boehme (2020) bahwa respons Jerman terhadap genosida di Namibia yang semula terkesan “*unapologetic*” menjadi “*apologetic*” kemudian bertransformasi ke arah positif dengan adanya kebijakan *political apology* Jerman tahun 2021 yang diikuti *wiedergutmachung* (reparasi) yang diberikan kepada Namibia.

Setelah perjalanan panjang Jerman dan Namibia dalam dialog mengenai kasus genosida di Namibia, diikuti dengan *political apology* 2004, pengembalian tengkorak korban genosida, *political apology* 2021 diikuti dengan reparasi yang membuktikan komitmen Jerman untuk benar-benar meminta maaf dan menebus kejahatan genosida di Namibia. Jerman yang semula dianggap enggan untuk meminta maaf dan menanggapi isu genosida di Namibia (Köbler, 2018).

Bersamaan dengan *political apology* 2021 Jerman yang disampaikan melalui pernyataan resmi Heiko Maas, Jerman memberikan reparasi untuk

Namibia sebesar 1.1 milyar euro yang akan direalisasikan dalam bentuk bantuan pembangunan, pertanian, infrastruktur desa dan sumber air bersih (www.auswaertiges-amt.de, 2021). Pendaan tersebut bertujuan untuk menyediakan asistensi terhadap pembangunan dan perkembangan masyarakat Namibia, khususnya mereka yang dahulu terdampak oleh genosida Herero dan Nama (Melber, 2022).

*Wiedergutmachung* bertujuan untuk memberi pesan positif pada generasi berikutnya bahwa terdapat cara untuk mengkomunikasikan niat baik meskipun terdapat kejahatan yang sempat terjadi di masa lalu dan pelakunya sudah tidak dapat dihukum dan sejak tahun 2017 pemerintah Jerman semakin intensif untuk menerapkan kebijakan ini (Federal Minister of Finance of Germany, 2021).

Sejauh ini, belum banyak penelitian yang membahas reparasi Jerman tahun 2021 sebab kebijakan tersebut tergolong masih baru. Beberapa penelitian mengenai *political apology* Jerman dari Reinhart Kossler (2015), Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strasser (2015), serta Franziska Boehme (2020) belum mencakup kebijakan terbaru Jerman dalam kasus genosida di Namibia, yaitu *political apology* tahun dan reparasi 2021.

Akan tetapi, Henning Melber (2022) dengan penelitian terbaru berjudul *Germany and Reparations: The Reconciliation Agreement with Namibia* mengkritisi reparasi 2021 Jerman bahwa jumlah dana yang

diberikan tidak cukup layak untuk menutup kasus genosida di Namibia (Melber, 2022).

### **BAB III**

## **ANALISIS *POLITICAL APOLOGY* JERMAN DALAM KASUS GENOSIDA DI NAMIBIA**

Di dalam bab ini, penelitian ini akan berfokus pada *political apology* dan reparasi Jerman pada tahun 2021 dan mencoba menjelaskan tentang proses *political apology* Jerman dengan menggunakan konsep *political apology* itu sendiri. Di dalam buku “*The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies*” karya Danielle Celermajer (2009), *political apology* bukan hanya sekadar tindakan untuk meminta maaf dan merekognisi kejahatan yang pernah diperbuat, tetapi juga pernyataan yang secara tidak langsung mengekspresikan keinginan untuk mencapai masa depan yang berbeda, terutama terkait relasi aktor yang berbuat salah dengan aktor yang sempat menjadi korban (Celermajer, 2009).

### **3.1 Analisis *Political Apology* Jerman 2021 Menggunakan Indikator-indikator *Political Apology***

Ralph Pettman (2015) berargumen bahwa pidato dan kata-kata adalah kekuatan yang menunjukkan kuatnya bahasa dalam kehidupan manusia, sehingga kata-kata dan tulisan mampu membuat manusia mengingat masa lalu dan bertopang dagu memikirkan masa depan. Oleh sebab itu, *political apology* adalah langkah awal yang tepat untuk merespons kekejaman masa lampau (Sprenger, Rodriguez, & Kamařuka, 2017). Berikut adalah analisis pernyataan resmi Heiko Maas dan pernyataan beliau di media sosial Twitter terkait *political apology* untuk kasus genosida di Namibia dengan

menggunakan indikator-indikator *political apology* dari Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner.

Dalam penelitian Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner dalam *Apology and Reconciliation in International Relations: The Importance of Being Sorry* (2016) terkait kasus genosida di Namibia berhenti pada kesimpulan bahwa Jerman sejauh ini hanya bafokus menerapkan *wiedergutmachung* atau kebijakan kompensasi dan reparasi terhadap holocaust saja dan kurang memperhatikan kejahatan dari pemerintah kolonial Jerman (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Akan tetapi, dengan pernyataan resmi Heiko Maas pada tahun 2021—yang tertulis secara lengkap di halaman lampiran—menunjukkan adanya penyesalan, rasa bersalah, permintaan maaf, serta reparasi sehingga sesuai dengan seluruh komponen *political apology* dari Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner (2017) sebagaimana tertulis pada tabel 1.2 bab 1 penelitian ini di bagian definisi konseptual.

Indikator pertama, identifikasi tindak kejahatan tertera dalam pidato Heiko Maas pada kalimat:

*“This includes being unreserved and unflinching in naming the events of the German colonial period in what is now Namibia and in particular the atrocities between 1904 and 1908.”* (Maas, 2021).

Heiko Maas juga memberikan pernyataan di media sosial Twitter dengan kalimat:

*“Today we only have one word for what the German Colonial occupation committed in #Namibia between 1904 and 1908: Genocide.”* (Maas, 2021).

Dengan bukti pernyataan resmi di situs resmi pemerintah Jerman dan pernyataan Heiko Maas di media sosial, maka sebagai representatif Jerman, telah terdapat pernyataan yang dengan jelas mengidentifikasi dan merekognisi tindak kejahatan yang pernah diperbuat oleh pemerintah kolonial Jerman, yaitu kejahatan genosida.

Kemudian, Heiko Maas menyampaikan pengakuan akan keterlibatan pemerintah kolonial Jerman sekaligus rasa penyesalan yang timbul karena genosida yang terjadi. Berikut kalimatnya:

*It is beyond doubt that the crimes committed during German colonial rule have long been a burden on our relations with Namibia.* (Maas, 2021).

Kalimat tersebut sesuai dengan indikator kedua dan ketiga *political apology* dari Christopher Daase, Stefan Engert, dan Judith Renner (2017) yaitu mengakui keterlibatan dan menyampaikan penyesalan akan tindak kejahatan yang pernah diperbuat yang dalam kasus ini adalah pelanggaran hak asasi manusia berupa kejahatan genosida yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908.

Indikator selanjutnya adalah komitmen untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat dan komitmen untuk tidak mengulang perbuatan yang serupa. Terdapat kalimat dalam pidato Heiko Maas yang juga memenuhi kedua kriteris tersebut yaitu:

*Our aim was and remains to find a shared path towards genuine reconciliation in memory of the victims.* (Maas, 2021).

Selain pidato resmi tersebut, Heiko Maas dengan jelas menyatakan permintaan maaf di media sosial Twitter beliau dengan kalimat:

*“We will ask forgiveness from #Namibia and the descendants of the victims.”* (Maas, 2021).

Dengan ini, Heiko Maas sebagai representasi Jerman telah menyampaikan kalimat permintaan maaf resmi kepada pihak Namibia atas kejahatan genosida yang pernah terjadi. Hal ini menjadi penutup dari kasus genosida di Namibia. Tak hanya itu, reparasi sebesar 1.1 milyar euro yang diberikan oleh Jerman juga merupakan langkah konkret untuk menebus kesalahan sebab menurut Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-andre Horelt, Judith Renneh, dan Reinhart Strassner (2017) indikator bahwa suatu negara berkomitmen untuk proaktif dalam rangka menebus kesalahan dapat dilakukan dengan reparasi atau kompensasi (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Secara resmi, Jerman melalui perwakilan Heiko Maas menyampaikan bahwa pihak Jerman dan Namibia telah mencapai kesepakatan final terkait perundingan kasus genosida Herero dan Nama dengan hasil akhir berupa *political apology* Jerman diikuti dengan rekognisi akan kejahatan genosida yang pada tahun 1904 hingga 1908 pernah terjadi, diikuti dengan reparasi sebesar 1.1 milyar euro, serta penyampaian harapan Jerman bahwa dengan adanya *political apology* tersebut maka kedepannya Jerman dan Namibia dapat menjalin hubungan lebih baik dan merakit masa depan yang lebih baik sebab pihak Jerman menyadari bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi

mereka masih dapat berupaya untuk memperbaiki masa depan (Maas, 2021).

Dengan adanya pernyataan yang mengekspresikan rasa bersalah dan penyesalan diikuti dengan komitmen untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa, permohonan maaf kepada Namibia, dan upaya untuk memberikan reparasi ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021) maka *political apology* Jerman pada tahun 2021 telah sesuai dengan indikator-indikator dari Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-andre Horelt, Judith Renneh, dan Reinhart Strassner (2017).

Oleh sebab itu, dengan status *political apology* sebagai gestur yang krusial dalam kasus kejahatan genosida karena berpotensi memperbaiki hubungan bilateral antarnegara yang terlibat dan juga dapat memberikan harapan bagi pihak korban sebab terdapat janji untuk tidak mengulang kejahatan tersebut (Zoodsma, Schaafsma, Sagherian-Dickey, & Friedrich, 2021). Maka *political apology* Jerman pada tahun 2021 telah membuktikan komitmen Jerman untuk menjadi negara yang lebih baik dan tidak akan mengulang tindak kejahatan genosida.

Setelah dilaksanakannya negosiasi antara pihak Jerman dengan Namibia pasal genosida Herero dan Nama, pemerintah Jerman pada akhirnya bersedia untuk memberikan reparasi moneter sebesar 1.1 milyar euro kepada pihak Namibia (European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), 2022). Naskah lengkap pidato Heiko Maas—Menteri Luar Negeri Jerman yang menjabat di bawah kabinet Angela Merkel—yang



dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Jerman ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021) terlampir di dalam lampiran.

Danielle Celermajer dalam bukunya yang berjudul *The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies* (2009) menguraikan tentang substansi penting yang sepatutnya terangkum dalam *political apology*. Elemen pertama adalah tindak kejahatan disampaikan dengan jelas, terkait kejadian apa yang mendasari pernyataan maaf tersebut (Celermajer, *The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies*, 2009), dalam pidato Heiko Maas terkait *political apology* tersebut beliau menyebutkan genosida sebagai tindak kejahatan yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Jerman, dalam hal ini elemen pertama telah tertuang dengan jelas.

Kedua, *political apology* harus memuat kesanggupan untuk bertanggung jawab (Celermajer, 2009) yang tertera jelas dalam pidato Heiko Maas, terutama pada kalimat:

*“Given Germany’s historical and moral responsibility, we will ask Namibia and the descendants of the victims for forgiveness.”* (Maas, 2021).

Yang membedakan antara *political apology* 2021 dengan *political apology* 2004 dari pihak Jerman adalah eksistensi dari reparasi. Dalam pidato yang disampaikan oleh Heiko Maas, beliau menyebutkan akan diberikannya dana reparasi sebesar 1.1 milyar euro untuk Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Keputusan ini menunjukkan adanya komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sebab reparasi memiliki esensi yang lebih dalam dari sekadar pendanaan atas nama permintaan maaf (Brooks, 1999).

Reparasi tersebut adalah bukti bahwa *political apology* Jerman bukan sekadar kata-kata maaf tanpa makna sebagaimana disimpulkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, oleh Christopher Daase, Stefan Engert, Michel Andre-Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017), dan Franziska Boehme (2020).

Ketiga, Danielle Celermajer (2009) berpendapat bahwa *political apology* yang layak harus secara eksplisit menyatakan adanya tujuan baik hendak dicapai dalam rangka berubah menjadi aktor yang lebih baik dan tidak mengulang kejahatan yang serupa (Celermajer, 2009). Dalam hal ini, Heiko Maas turut menyampaikan orientasi dari Pemerintah Jerman yang menghendaki adanya rekonsiliasi dan hubungan yang lebih harmonis dengan Namibia di masa yang akan datang.

Tidak hanya sesuai dengan indikator-indikator dari Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017) serta komponen-komponen esensial *political apology* dari Danielle Calermajer (2009), tetapi *political apology* Jerman pada 2021 yang disampaikan oleh Heiko Maas juga memenuhi komponen-komponen *political apology* dari Reinhart Kössler (2015), yaitu identifikasi pihak yang direpresentasikan dengan jelas, mengartikulasikan penderitaan yang dialami oleh pihak korban, mengekspresikan harapan untuk tidak mengulang kejahatan tersebut untuk kedua kalinya, serta menyatakan permintaan maaf (Kössler, 2015).

Menurut Franziska Boehme (2020), ketidakmudahan *political apology* dan reparasi untuk dirumuskan di tengah komplikasi kejahatan masa lalu Jerman, seperti holocaust, menyebabkan perkembangan kasus genosida Herero dan Nama menjadi terhambat (Boehme, 2020). Terlepas dari cepat atau lambatnya proses negosiasi antara Jerman dan Namibia, pada tahun 2021 pemerintah Jerman menerbitkan hasil kesimpulan dari kasus tersebut melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri Jerman dan akun media sosial Heiko Maas selaku Menteri luar negeri Jerman ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

*Political apology* dan reparasi adalah penutup yang dapat membawa arah hubungan Jerman dan Namibia menuju hubungan yang baik (Kössler, 2015), maka *political apology* yang diikuti dengan reparasi dari Jerman untuk Namibia sesuai dengan pidato resmi dari Heiko Maas adalah penutup yang selama ini dinantikan sebagai kebijakan yang mulia untuk merespons kekejaman genosida di masa kolonialisme.

### **3.2 Proses *Political Apology* Jerman Tahun 2021**

Di dunia yang menyoarakan hak asasi manusia dan kesetaraan rasial, ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah fakta tentunya berbicara sebaliknya sebab rasisme, perbudakan, penyiksaan, bahkan genosida mewarnai kehidupan era kolonialisme yang kontradiktif dengan kesetaraan dalam norma hak asasi manusia di era kini (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019).

Terlebih kejahatan genosida yang ditentang oleh seluruh dunia hingga dunia internasional berupaya mencegah terjadinya kejahatan genosida (Longobardo, 2015), maka ketika melihat masa lalu yang kontradiktif agaknya kepasifan yang selama ini dinormalisasi terkesan tidak mendalami norma hak asasi manusia sebab tidak adanya ekspresi merasa bersalah ataupun menyesal atas kekejaman yang dahulu pernah diperbuat (Mihai & Thaler, 2014). Dengan adanya *wiedergutmachung*, maka Jerman telah mengambil langkah untuk bertanggung jawab atas masa lalunya (Federal Ministry of Finance of Germany, 2018).

Selain melanggar hak hidup dengan melakukan praktik kejahatan genosida, pasukan militer Jerman yang pada waktu itu berada di Namibia atau yang dikenal dengan istilah *schutztruppe* turut melakukan tindak kejahatan berupa perbudakan dan penyiksaan terhadap masyarakat Herero dan Nama yang berhasil selamat dari praktik genosida tersebut (European Center for Constitutional and Human Rights, 2020). Berdasarkan penelitian Jonatan Lyrefelt (2020), korban genosida yang selamat ditempatkan di penampungan yang tidak memenuhi standar sanitasi layak huni, kemudian mereka diperbudak dan wajib bekerja hingga meninggal (Lyrefelt, 2020).

Berdasarkan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide artikel 1 yang berbunyi:

*“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish”* (United Nations, 1948).

Maka Jerman sebagai negara yang telah mengakesi konvensi tersebut pada 24 November 1954 (United Nations, 1951) memiliki kewajiban untuk mematuhi Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Dengan ini, jika dibandingkan dengan kepasifan terhadap catatan gelap masa kolonialisme yang merekam jejak genosida, *political apology* tentunya menjadi opsi yang lebih baik karena *political apology* mampu menyembuhkan kesengsaraan yang pernah terjadi dengan rekonsiliasi, efek psikologis yang positif, kemudian memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku sehingga kedepannya dapat hidup berdampingan (Thompson, 2012).

Sanderijn Cels berargumen bahwa *political apology* dapat memberikan dukungan moral dan psikologikal kepada pihak korban sebab adanya gestur baik yang memberikan validasi atas trauma korban dan secara tidak langsung menjamin keamanan korban sebab adanya komitmen untuk tidak mengulang kekejaman yang pernah terjadi (Cels, 2015). *Political apology* juga berpotensi untuk memberikan pengaruh positif kepada para korban sebab teradapat pesan tersirat yang penuh harapan dan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik (Zoodsma, Schaafsma, Sagherian-Dickey, & Friedrich, 2021).

*Political apology* memungkinkan negara yang sempat memegang status sebagai pelaku dan korban kejahatan di masa lampau mencapai rekonsiliasi jangka panjang (Sarkin, 2009; Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017). Sehingga dengan adanya *political apology* dari Jerman

untuk merespons kasus genosida Herero dan Nama, maka terdapat potensi untuk tercapainya hubungan baik antara Jerman dengan Namibia.

Mihai dan Thaler (2014) berargumen bahwa *political apology* memiliki banyak fungsi, yaitu:

- a. Menceritakan kembali kesalahan yang pernah diperbuat;
- b. Mengakui bahwa pihak yang meminta maaf bersalah atas kejahatan yang pernah terjadi;
- c. Menyatakan bahwa negara tersebut kontra akan kejahatan yang pernah terjadi;
- d. Memberikan validasi kepada pihak korban bahwa mereka sempat menjadi korban dari tindak kejahatan pelaku;
- e. Membangun komitmen untuk menjadi aktor yang lebih baik;
- f. Menginisiasi proses rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antarpihak yang terlibat;
- g. Menciptakan penutup yang baik atas kejahatan yang pernah terjadi (Mihai & Thaler, 2014).

Oleh karena itu, *political apology* menjadi jawaban dari argumen moral terkait masa lalu dan masa kini yang berkesinambungan sebab hanya karena korban-korban genosida Herero dan Nama tidak dapat menuntut tindak kekejaman yang pernah terjadi dan pelaku-pelaku tindak kejahatan genosida tersebut sudah meninggal, bukan berarti kejahatan genosida yang pernah terjadi dapat dinormalisasi dengan kepasifan (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019).

Dengan ini, ketika Jerman memilih *political apology* sebagai kebijakannya dalam merespons kasus genosida terhadap etnis Herero dan etnis Nama, maka secara tidak langsung Jerman menyatakan bahwa mereka anti terhadap kejahatan genosida dan mendukung hak asasi manusia, meskipun Jerman sempat melakukan kejahatan tersebut di masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya publikasi resmi Pemerintah Jerman yang berjudul “Wiedergutmachung: Provisions relating to compensation for National Socialist Injustice” yang berisikan tentang pembahasan komprehensif mengenai bagaimana proses kebijakan Jerman seputar *wiedergutmachung* yang bertujuan untuk “mengobati luka lama” korban kejahatan Jerman di era Nazi.

Di dalam publikasi resmi tersebut Jerman turut menjelaskan tentang The Foundation for Remembrance, Responsibility and the Future (*Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft*) yang merupakan badan yang dibentuk khusus untuk mengorganisir *wiedergutmachung* (reparasi atau kompensasi). Badan ini kemudian bertanggungjawab atas finansial Jerman

yang ditujukan untuk korban-korban kejahatan Jerman di masa lalu (Federal Ministry of Finance of Germany, 2018). Di dalam publikasi tersebut juga disebutkan bahwa Jerman telah bertanggung jawab atas masa lalunya dengan merealisasikan *wiedergutmachung* (Federal Ministry of Finance of Germany, 2018).

Dengan adanya *wiedergutmachung* dan *political apology* 2021, apabila kita mengamati publikasi Pemerintah Jerman mengenai Agenda Hak Asasi Manusia Jerman tahun 2021-2022, agenda-agenda yang bertemakan *combating human rights violations* tidak lagi terkesan sangat kontradiktif dengan masa lalu Jerman sebagai negara bangsa. *Wiedergutmachung* dan *political apology* memiliki keterlibatan dengan hak asasi manusia sebab kebijakan tersebut menunjukkan adanya rasa hormat terhadap martabat umat manusia yang pada dasarnya setara.

Hal ini dikarenakan sifat dari *political apology* yang restoratif sebab dengan *political apology*, pihak yang bersalah telah mengaku bersalah, mengakui bahwa mereka telah menciptakan kesengsaraan untuk pihak korban, dan apabila didukung dengan reparasi, maka *political apology* tersebut menandakan bahwa pihak yang bersalah berkomitmen untuk tidak mengulang tindak kejahatan tersebut di masa mendatang (Zoodsma, Schaafsma, Sagherian-Dickey, & Friedrich, 2021). Tak hanya itu, *political apology* juga merupakan tindakan yang *powerful* karena *political apology* secara tidak langsung memberikan rekognisi moral serta *acknowledgement of the victims' worth and dignity* (Thompson, 2008). Demikian, *political*



*apology* tidak hanya sebatas permintaan maaf saja, tetapi berpotensi memperbaiki masa depan dan mendukung inklusivitas serta menolak keras rasisme dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya—sesuai dengan yang tertulis dalam Action Plan Hak Asasi Manusia Jerman tahun 2021-2022.

Di dalam Action Plan Hak Asaasi Mnesia Jerman tahun 2021-2022 secara tertulis disebutkan bahwa Jerman akan mendukung resolusi konflik dan *peacebuilding* dalam rangka mendukung penegakan hak asasi manusia, salah satunya dengan mempromosikan *dealing with the past*, sebagai berikut:

*“The German Government will take it as a strategic objective in every strand of its foreign policy to advance the rule of law, promote dealing with the past, work for reconciliation and support security-sector reform at the bilateral and multilateral levels.”* (Federal Foreign Office of Germany, 2020).

Tak hanya sesuai dengan Action Plan Jerman tahun 2021-2022, kebijakan *political apology* dan reparasi dari Jerman sebagai respons terhadap kejahatan genosida juga merupakan langkah konkret dari komitmen Jerman untuk mewujudkan rekonsiliasi dan memperbaiki masa depan sebagaimana disampaikan oleh Heiko Maas—Menteri Luar Negeri Jerman—dalam pernyataan resmi Pemerintah Jerman pada 28 Mei 2021 ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

Berdasarkan penelitian dari Marieke Zoodsma, Juliette Schaafsma, Thia Sagherian-Dickey, and Jasper Friedrich (2021) yang menyatakan bahwa *political apology* bukan sekadar rentetan kalimat, melainkan bentuk

tanggung jawab suatu negara terhadap tindak kejahatan yang pernah diperbuat di masa lampau (Zoodsma et al., 2021). Dengan ini, Jerman telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan tengah berjuang untuk membentuk masa depan yang lebih baik sebagaimana disampaikan oleh Heiko Maas dalam pidato resminya.

### **3.3 Respons Terhadap *Political Apology* Jerman dalam Kasus Genosida Herero dan Nama**

Nangolo Mbumba—Wakil Presiden Namibia—menyampaikan pernyataan bahwa Namibia dan Jerman telah sepakat untuk menutup kasus genosida setelah perjalanan panjang (Mbumba, 2021). Nangolo Mbumba juga menyampaikan bahwa hasil akhir negosiasi mencakup rekognisi genosida dari pihak Jerman, *political apology* dari pemerintah Jerman kepada pihak Namibia, serta Jerman bersedia memberikan reparasi material sebesar 1.1 milyar euro (Mbumba, 2021).

Reparasi dari Jerman tersebut kemudian akan dialokasikan ke dalam program pembangunan di Namibia, khususnya bagi komunitas yang merupakan keturunan dari korban genosida, yaitu Herero dan Nama (Mbumba, 2021). Wakil Presiden Nangolo Mbumba juga menyatakan bahwa objektif dari rekonsiliasi antara Jerman dengan Namibia untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan di Namibia, khususnya di

komunitas Herero dan Nama telah tercapai dengan program reparasi dari Jerman (Mbumba, 2021).

Sementara itu, Reinhart Kössler dalam situs berita Daily Maverick menuliskan artikel bersama Henning Melber pada 2 Juni 2021 lalu dengan judul *Germany-Namibia landmark accord: Negotiating the price tag of redemption for colonial genocide*. Kössler dan Melber (2021) berargumen bahwa kejahatan seperti genosida yang memakan ribuan korban ditambah dengan dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan tidak akan dapat dikonversikan ke dalam bentuk angka, sehingga kompensasi sebesar apapun sebenarnya tidak dapat menggantikan ribuan nyawa yang telah hilang ataupun menghapuskan kekejaman yang telah terjadi (Kössler & Melber, Daily Maverick, 2021).

Kössler dan Melber pun turut menyampaikan bahwa jumlah reparasi yang diberikan Jerman kepada Namibia terlalu kecil untuk mengekspresikan rasa beresalah dan penyesalan atas genosida Herero dan Nama (Kössler & Melber, Daily Maverick, 2021; Melber, 2022). Di sisi lain, Janna Thompson (2009) berargumen bahwa ketika peristiwa sejarah dilupakan, maka ketidakpedulian tersebut adalah tindak kejahatan terhadap pihak yang sempat menjadi korban, sejarah tidak seharusnya dilupakan begitu saja (Thompson, 2009).

Oleh sebab itu, terlepas dari jumlah reparasi yang dikeluarkan oleh Jerman, Kössler dan Melber (2021) menilai bahwa *political apology* dan reparation sebesar 1.1 milyar euro ini merupakan langkah awal untuk

menghapuskan amnesia terhadap kekejaman kolonialisme, tindakan tersebut setidaknya lebih baik daripada kepasifan dan penyangkalan (Kössler & Melber, Daily Maverick, 2021). Michel-Rolph Trouillot (2000) menyatakan bahwa apologetic attitude setidaknya dapat membantu menghapuskan moral stain dari kekejaman Jerman sebagai suatu negara.

Janna Thompson (2008) berargumen bahwa *political apology* lebih dari sekadar kata-kata belaka, sebab tindakan tersebut berpeluang mewujudkan rekonsiliasi menciptakan hubungan sosial yang harmonis, dan mencegah munculnya hambatan di dalam hubungan antar negara kedepannya (Thompson, 2008). Hal ini dibuktikan dengan pidato resmi dari Wakil Presiden Namibia, Nangolo Mbumba pada 9 Juni 2021 yang menyatakan bahwa:

*“I am glad to note that the bilateral relations between the two countries will no longer be at the same level, but would be elevated to the highest level.”* (Mbumba, 2021).

Respons positif dari pihak Namibia yang disampaikan oleh Wakil Presiden Nangolo Mbumba kemudian menjadi penutup dari episode *political apology* Jerman di tahun 2021 setelah perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh Namibia dan Jerman dalam pembahasan kasus genosida Herero dan Nama. Pada akhirnya, *political apology* dan reparasi dari Jerman untuk Namibia berhasil menuai respons positif dari pihak Namibia sebagaimana argumen Janna Thompson (2012) serta Mihai dan Thaler (2014) bahwa *political apology* dapat berfungsi sebagai penutup bagi

pihak yang sempat terluka dan pada akhirnya mampu menatap masa depan dengan penuh harap (Thompson, 2012; Mihai & Thaler, 2014).

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Analisis kebijakan *political apology* dan reparasi Jerman menggunakan konsep *political apology* mengungkap bagaimana kebijakan ini diambil oleh pihak Jerman sebagai perwujudan dari Action Plan Hak Asasi Manusia Jerman periode 2021-2022, khususnya melalui *promote dealing with the past* yang kemudian diikuti dengan reparasi. Kebijakan ini adalah bentuk harapan Jerman untuk mencapai rekonsiliasi dan memperbaiki masa depan. Setelah dianalisis menggunakan indikator-indikator *political apology*, Jerman dapat dikatakan berhasil menerapkan kebijakan *political apology* sesuai dengan seluruh indikator yang dikemukakan oleh Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner yang kemudian diperkuat dengan pemberian reparasi kepada Namibia. Kemudian, komitmen Jerman dalam “menyembuhkan luka lama” ditunjukkan dari penerapan *wiedergutmachung* atau reparasi melalui badan Erinnerung Verantwortung Zukunft yang tidak hanya memberikan reparasi pada korban holocaust, tetapi juga termasuk korban genosida di Namibia dibuktikan dengan reparasi yang diberikan di tahun 2021.

Selain berhasil mencapai rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan bilateral antara Jerman dengan Namibia, *political apology* dan reparasi Jerman juga berhasil menunjukkan reformasi moral dari pihak Jerman itu sendiri karena dengan adanya *political apology*, maka Jerman telah

menyampaikan bahwa Jerman adalah negara yang menghargai hak asasi manusia dan tidak lagi mendukung pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kejahatan genosida.

Di tengah perjuangan penegakan hak asasi manusia, terlepas dari sejarah kejam yang berdarah-darah, Jerman termasuk salah satu negara yang solutif dan proaktif dalam menanggapi catatan sejarah gelapnya dengan menerapkan *political apology* dan reparasi. Dengan langkah ini, Jerman berada di barisan depan untuk memutus rantai normalisasi terhadap praktik-praktik kejam yang terjadi di era kolonialisme. Kebijakan *political apology* Jerman tahun 2021 kepada Namibia membuktikan komitmen Jerman yang tercantum dalam Action Plan Hak Asasi Manusia Jerman tahun 2021-2022 bahwa Jerman akan berkontribusi dalam penegakan hak asasi manusia, termasuk dengan *promoting dealing with the past*.

Respons positif dari pihak Namibia kemudian menunjukkan bahwa kebijakan *political apology* dan reparasi Jerman adalah kebijakan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bertindak seolah kekejaman yang pernah terjadi di era kolonialisme tidak pernah ada. Dengan keberanian untuk menghadapi masa lampau, maka perjuangan untuk memperbaiki masa depan dapat diperjuangkan tanpa adanya perdebatan terkait catatan sejarah yang kontradiktif dengan hak asasi manusia.

## 4.2 Saran

Penelitian ini membahas proses *political apology* Jerman tahun 2021 sebagai respons dari kejahatan genosida di Namibia yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908 dengan menggunakan konsep *political apology* itu sendiri sesuai dengan indikator-indikator *political apology* dari Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017), komponen-komponen dari Danielle Calermajer (2009), dan fungsi *political apology* dari Mihaela Mihai dan Matias Thaler (2014). Terkait dengan bagaimana Jerman mengambil kebijakan *political apology* dan reparasi pada tahun 2021 secara spesifik, diperlukan penelitian baru dengan variabel berbeda yang tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan argument yang berbeda dengan penelitian ini.

Selain itu, topik *political apology* dan reparasi Jerman tahun 2021 pun dapat dibahas dengan penggunaan teori serta paradigma lain yang dapat menyajikan hasil penelitian berbeda sesuai dengan perspektif yang digunakan. Mengingat hal ini, maka penelitian dengan kebaruan terkait isu *political apology* dan reparasi Jerman tahun 2021 masih dapat dikembangkan secara luas.

Terkait dengan sumber data penelitian, penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan kompeten, atau bahkan menghadirkan aktor yang terlibat secara langsung dalam kebijakan *political apology* dan



reparasi Jerman di tahun 2021. Karena dengan menggunakan sumber data primer, maka penelitin dengan topik ini maka penelitian akan mendapatkan hasil yang lebih jelas dan komprehensif dari sudut pandang aktor yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bloxham, D., & Moses, A. D. (2010). *The Oxford Handbook of Genocide Studies* (D. Bloxham & A. D. Moses, Eds.; Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199232116.001.0001>
- Brooks, R. (1999). *When Sorry Isn't Enough*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814739471.001.0001>
- Celermajer, D. (2009). *The Sins of the Nation and the Ritual of Apologies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511581502>
- Daase, C., Engert, S., Horelt, M.-A., Renner, J., & Strassner, R. (2015). *Apology and Reconciliation in International Relations* (C. Daase, S. Engert, M.-A. Horelt, J. Renner, & R. Strassner, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315743554>
- Dreyfus, J.-Marc., & Anstett, E. (2017). *Human Remains in Society* (É. Anstett & J.-M. Dreyfus, Eds.). Manchester University Press. <https://doi.org/10.7228/manchester/9781526107381.001.0001>
- Engert, S. (2014). Confessing the Holocaust: The Evolution of German Guilt. Dalam M. Mihai, & M. Thaler, *On the Uses and Abuses of Political Apologies* (hal. 96-118). London: Palgrave Macmillan. doi:<https://doi.org/10.1057/9781137343727>
- Engert, S. (2016). Germany-Namibia: The Belated Apology to the Herero. Dalam C. Daase, S. Engert, M.-A. Horelt, J. Renner, & R. Strassner, *Apology and Reconciliation in International Relations: The Importance of Being Sorry* (hal. 127-145). Oxford: Routledge. Diambil kembali dari <https://www.routledge.com/Apology-and-Reconciliation-in-International-Relations-The-Importance-of/Daase-Engert-Horelt-Renner-Strassner/p/book/9781138558656>
- Faber-Jonker, L. (2018). *More than just an object: A material analysis of the return and retention of Namibian skulls from Germany*. African

- Studies Centre Leiden (ASCL).  
<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/59751>
- Gill, M. J. (2020). Phenomenology as qualitative methodology. *Qualitative Analysis: Eight Approaches*, 73-94. *Qualitative Analysis : Eight Approaches for the Social Sciences* - Mik-Meyer, Nanna - Järvinen, Margaretha - SAGE Publications Ltd - Torrossa
- Greenstein, F. I., & Polsby, N. W. (1919). *Handbook of Political Science VI: Policies and Policy Making*.  
<http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/17667>
- Jones, K. (2015). Vergangenheitsbewältigung À La Française: Post-Colonial Memories Of The Herero Genocide And 17 October 1961. Dalam M. Perraudin, & J. Zimmerer, *German Colonialism and National Identity* (hal. 213-223). Routledge. Diambil kembali dari <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203852590-25/vergangenheitsbew%C3%A4ltigung-la-fran%C3%A7aise-post-colonial-memories-herero-genocide-17-october-1961-kathryn-jones>
- Kössler, R. (2015). *Namibia and Germany: Negotiating the Past*. University of Namibia Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh8r4d4>
- Köbler, R. (2018). Imperial skulduggery, science and the issue of provenance and restitution: The fate of Namibian skulls in the Alexander Ecker Collection in Freiburg. *Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal*, 4(2), 27–44.  
[https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/25015/9781138344174\\_text.pdf?sequence=1#page=131](https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/25015/9781138344174_text.pdf?sequence=1#page=131)
- MacLachlan, A. (2014). Beyond the Ideal Political Apology. In M. Mihai & M. Thaler (Eds.), *On the Uses and Abuses of Political Apologies*. Palgrave MacMillan.
- Mihai, M., & Thaler, M. (2014). *On the Uses and Abuses of Political Apologies* (M. Mihai & M. Thaler, Eds.). Palgrave Macmillan UK.  
<https://doi.org/10.1057/9781137343727>

- Moses, A. D. (2010). Raphael Lemkin, Culture, and The Concept of Genocide. Dalam D. Bloxham, & A. D. Moses, *The Oxford Handbook of Genocide Studies* (hal. 1-19). Oxford: The Oxford University Press. Diambil kembali dari <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203852590-30/struggle-genocidal-exclusivity-perception-murder-namibian-herero-1904%E2%80%93age-new-international-morality-dominik-schaller>
- Richards, L., & Morse, J. M. (2013). *Readme First For A User'S Guide To Qualitative Methods* (3rd ed.). Los Angeles, California, United States of America: SAGE Publications, Inc. Retrieved January 21, 2022, from <https://us.sagepub.com/en-us/nam/readme-first-for-a-users-guide-to-qualitative-methods/book236735>
- Sarkin, J. (2009). *Colonial Genocide and Reparations Claims in the 21st Century: The Socio-Legal Context of Claims under International Law by the Herero against Germany for Genocide in Namibia*. Greenwood Publishing Group. Diambil kembali dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aVX3XcuC9akC&oi=fnd&pg=PR5&dq=jeremy+sarkin+2009&ots=wSLWGbAK0b&sig=dXAPJ3Bdt-mD-lFXjYRrfMni4D8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=jeremy%20sarkin%202009&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aVX3XcuC9akC&oi=fnd&pg=PR5&dq=jeremy+sarkin+2009&ots=wSLWGbAK0b&sig=dXAPJ3Bdt-mD-lFXjYRrfMni4D8&redir_esc=y#v=onepage&q=jeremy%20sarkin%202009&f=false)
- Shigwedha, V. A. (2016). The return of Herero and Nama bones from Germany: the victims' struggle for recognition and recurring genocide memories in Namibia. *Human Remains in Society*, 196–219. Manchester University Press. <https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526116741/human-remains-and-mass-violence/>

## Jurnal

- Boehme, F. (2020). Reactive remembrance: The political struggle over apologies and reparations between Germany and Namibia for the Herero genocide. *Journal of Human Rights*, 19(2), 238–255. <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1727729>
- Cels, S. (2015). Interpreting Political Apologies: The Neglected Role of Performance. *Political Psychology*, 36(3), 351–360. <https://doi.org/10.1111/pops.12092>
- Gropengießer, H. (2005). The Criminal Law of Genocide. The German Perspective. *International Criminal Law Review*, 5(3), 329–342. <https://doi.org/10.1163/1571812054940067>
- Longobardo, M. (2015). Genocide, Obligations Erga Omnes, And The Responsibility To Protect: Remarks On A Complex Convergence. *The International Journal of Human Rights*, 19(8), 1199–1212. <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1082834>
- Lyrefelt, J. (2020). Echoes of the Past: The Legacy of the Herero-Nama Genocide in Namibia. *Stockholm University*, 1-64. Diambil kembali dari <https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1556245/FULLTEXT01.pdf>
- Madley, B. (2005). From Africa to Auschwitz: How German South West Africa Incubated Ideas and Methods Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe. *European History Quarterly*, 35(3), 429–464. <https://doi.org/10.1177/0265691405054218>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1998). The Institutional Dynamics of International Political Orders. *International Organization*, 52(4), 943–969. <https://doi.org/10.1162/002081898550699>
- Marrus, M. R. (2007). Official Apologies and the Quest for Historical Justice. *Journal of Human Rights*, 6(1), 75–105. <https://doi.org/10.1080/14754830601098402>

- Melber, H. (2005). How to come to terms with the past: Re-visiting the German colonial genocide in Namibia. *Africa Spectrum*, 40, 139–148.
- Melber, H. (2020). Germany and Namibia: Negotiating Genocide. *Journal of Genocide Research*, 22(4), 502–514. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1750823>
- Melber, H. (2022) Germany and reparations: the reconciliation agreement with Namibia, *The Round Table*, 111:4, 475-488, DOI: 10.1080/00358533.2022.2105540
- Schaafsma, J., Zoodma, M., & Sagherian-Dickey, T. (2021). Closing chapters of the past? Rhetorical strategies in political apologies for human rights violations across the world. *Journal of Human Rights*, 20(5), 582–597. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.1977919>
- Schüring, E. (2004). <https://dl.tufts.edu/>. Diambil kembali dari Thesis in Fletcher School of Law and Diplomacy: <http://hdl.handle.net/10427/55686>
- Shelton, D. (2007). Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. 3 vols. Detroit, MI: Macmillan Reference, 2005. Pp. 1,500 (approx.). Index. \$435. *American Journal of International Law*, 101(1), 264–265. <https://doi.org/10.1017/S0002930000029742>
- Shigwedha, V. A. (2016). The return of Herero and Nama bones from Germany: the victims' struggle for recognition and recurring genocide memories in Namibia. *Human Remains in Society*, 196–219.
- Sprenger, N., Rodriguez, R., & Kamatuka, N. (2017). The Ovaherero/Nama Genocide: A Case for Apology and Reparations. *European Scientific Journal*, 120–146.
- Thaler, M. (2012). Just pretending: political apologies for historical injustice and vice's tribute to virtue. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 15(3), 259–278. <https://doi.org/10.1080/13698230.2011.640810>
- Thompson, J. (2008). Apology, justice, and respect: A critical defense of political apology. *The Age of Apology: Facing up to the Past*, 31–44.

- Thompson, J. (2009). Apology, historical obligations and the ethics of memory. *Memory Studies*, 2(2), 195–210. <https://doi.org/10.1177/1750698008102052>
- Thompson, J. (2012). Is Political Apology a Sorry Affair? *Social & Legal Studies*, 21(2), 215–225. <https://doi.org/10.1177/0964663911435519>
- Trouillot, M.-R. (2000). Abortive Rituals: Historical Apologies in the Global Era. *Interventions*, 2(2), 171–186. <https://doi.org/10.1080/136980100427298>
- Winter, S. (2015). Theorising the Political Apology. *Journal of Political Philosophy*, 23(3), 261–281. <https://doi.org/10.1111/jopp.12047>
- Zoodsma, M., & Schaafsma, J. (2022). Examining the ‘age of apology’: Insights from the Political Apology database. *Journal of Peace Research*, 59(3), 436–448. <https://doi.org/10.1177/00223433211024696>
- Zoodsma, M., Schaafsma, J., Sagherian-Dickey, T., & Friedrich, J. (2021). These Are Not Just Words: A Cross-National Comparative Study of the Content of Political Apologies. *International Review of Social Psychology*, 34(1). <https://doi.org/10.5334/irsp.503>

### **Internet**

- BBC. (2021, Mei 28). *News: Germany officially recognises colonial-era Namibia genocide*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-57279008>
- Hambira, K., & Gleckman-Krut, M. (2021, Juli 8). *Germany Apologized for a Genocide: It's Nowhere Near Enough*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2021/07/08/opinion/germany-genocide-herero-nama.html>
- Kennedy, R. (2021, Mei 2021). *Germany agrees to officially recognise colonial-era killings in Namibia as genocide*. Retrieved from Euronews.com: <https://www.euronews.com/my->

europa/2021/05/28/germany-to-recognise-colonial-killings-in-namibia-as-genocide

Kössler, R., & Melber, H. (2021, Juni 2). *Germany-Namibia landmark accord: Negotiating the price tag of redemption for colonial genocide*. Retrieved from Daily Maverick: <https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-02-germany-namibia-landmark-accord-negotiating-the-price-tag-of-redemption-for-colonial-genocide/>

Mbumba, N. (2021, Mei 9). *The Namibian*. Retrieved from <https://youtu.be/HecuKuUP0Z0>: <https://youtu.be/HecuKuUP0Z0>

Schmidt, N., Engels, G., Busari, S., & McKenzie, D. (2021, Mei 28). *Germany Will Pay Namibia \$1.3bn As It Formally Recognizes Colonial-Era Genocide*. Diambil kembali dari CNN: <https://edition.cnn.com/2021/05/28/africa/germany-recognizes-colonial-genocide-namibia-intl/index.html>

### **Laporan atau Situs Resmi**

Erinnerung Verantwortung Zukunft. (2000). *Foundation of Remembrance, Responsibility, and Future*. Retrieved from <https://www.stiftung-evz.de/>: <https://www.stiftung-evz.de/>

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). (2022, October). *Repairing The Irreparable? Tackling The Long Term Effects Of German Colonialism In Germany & Namibia*. Retrieved from [ecchr.eu](https://www.ecchr.eu/): [https://www.ecchr.eu/fileadmin/user\\_upload/ECCHR\\_PP\\_NAMIBIA\\_WEB.PDF](https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/ECCHR_PP_NAMIBIA_WEB.PDF)

European Center for Constitutional and Human Rights. (2019). *Colonial Repercussions: Namibia*. Berlin: European Center for Constitutional and Human Rights. Diambil kembali dari [https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR\\_NAMIBIA\\_DS.pdf](https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_NAMIBIA_DS.pdf)



- European Center for Constitutional and Human Rights. (2020, October 31). *The Office of the High Commissioner for Human Rights*. Diambil kembali dari [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org): [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Truth/Call\\_LegacyColonialism/CSO/ECCHR-Annex-1.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Truth/Call_LegacyColonialism/CSO/ECCHR-Annex-1.pdf)
- European Center of Constitutional and Human Rights. (2021, September 11). *European Center of Constitutional and Human Rights*. Diambil kembali dari [www.ecchr.eu](http://www.ecchr.eu): [https://www.ecchr.eu/fileadmin/Juristische\\_Dokumente/ICCPR\\_Alt\\_Report\\_2021\\_Germany.pdf](https://www.ecchr.eu/fileadmin/Juristische_Dokumente/ICCPR_Alt_Report_2021_Germany.pdf)
- European Union. (2012, Oktober 26). *eur-lex.europa.eu*. Retrieved from Consolidated Version of The Treaty On European Union: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF)
- European Union. (t.thn.). *Why Do We Need The Charter?* Diambil kembali dari <https://commission.europa.eu/>: [https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter_en)
- Federal Ministry of Finance of Germany. (2018). *Wiedergutmachung: Provisions Relating to Compensation*. Berlin: Bundes Finanz Ministerium. Diambil kembali dari [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press\\_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=8](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=8)
- Federal Minister of Finance of Germany. (2021). *www.bundesfinanzministerium.de*. Diambil kembali dari Bundesministerium der Finanzen: [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche\\_Finzen/Vermögensrecht\\_und\\_Entschädigung/stiftung-erinnerung-verantwortung-zukunft.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finzen/Vermögensrecht_und_Entschädigung/stiftung-erinnerung-verantwortung-zukunft.html)

Federal Ministry of Finance of Germany. (2018, Agustus 5). *www.bundesfinanzministerium.de*. Diambil kembali dari Federal Ministry of Finance of Germany: [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press\\_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=8](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=8)

Federal Foreign Office of Germany (2020, Desember 1). *www.auswaertiges-amt.de*. Diambil kembali dari Federal Foreign Office of Germany: <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2422644/3f981cf30f610babfd16d0eb63ee542c/201202-mrb-14-download-data.pdf>

Genocide Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. (1948, Desember 9). *www.un.org/en/genocideprevention*. Diambil kembali dari United Nations: [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1\\_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf)

Maas, H. (2021, Mei 28). *Federal Foreign Office of Germany*. Retrieved from <https://www.auswaertiges-amt.de>: <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2463598>

The Federal Government of Germany. (2023). *www.bundesregierung.de*. Diambil kembali dari Press and Information Office of the Federal Government of Germany: <https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-cabinet/1134574-1134574>

United Nations. (1948, Desember 9). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Diambil kembali dari [www.un.org](http://www.un.org): [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1\\_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf)

United Nations. (1951, January 12). *United Nations Treaty Collection*.

Diambil kembali dari United Nations: Treaty Collection:

<https://treaties.un.org/>:

<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-1.en.pdf>

Wieczorek-Zeul, H. (2004, Agustus 14). *Botschaft der Republik Namibia in der Bundesrepublik Deutschland [Speech Transcript]*. Diambil kembali dari <http://www.namibia-botschaft.de/>:

<http://www.namibia-botschaft.de/gedenken.html>

[www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de); (2021, Mei 28). *Press Release: Foreign Minister Maas on the conclusion of negotiations with Namibia*. Retrieved from

Federal Foreign Office: [www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de) :

<https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2463598>

[www.bundesfinanzministerium.de](http://www.bundesfinanzministerium.de). (2022, Juni 1). *Over 70 years of development history of compensation*. Diambil kembali dari

Kementerian Keuangan Jerman: [www.bundesfinanzministerium.de](http://www.bundesfinanzministerium.de):

[https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilung\\_en/Finanzpolitik/2022/06/2022-06-01-entwicklungsgeschichte-der-wiedergutmachung.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilung_en/Finanzpolitik/2022/06/2022-06-01-entwicklungsgeschichte-der-wiedergutmachung.html)

[www.namibia-botschaft.de](http://www.namibia-botschaft.de). (2004, Agustus 14). *Botschaft der Republik Namibia in der Bundesrepublik Deutschland*. Diambil kembali dari

<http://www.namibia-botschaft.de/>:

<http://www.namibia-botschaft.de/gedenken.html>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Pidato Heidemarie Wieczorek-Zeul pada 14 Agustus 2004**

[Heidemarie Wieczorek-Zeul]

*It is an honour to have been invited to take part in your commemorations here today. I would like to thank you for giving me, as the German Minister for Economic Cooperation and Development and as a representative of the German government and the German parliament, this opportunity to speak to you. Yet I am also here to listen to you.*

*Today, I want to acknowledge the violence inflicted by the German colonial powers on your ancestors, particularly the Herero and the Nama. I am painfully aware of the atrocities committed: in the late 19th century, the German colonial powers drove the people from their land. When the Herero, when your ancestors, resisted, General von Trotha's troops embarked on a war of extermination against them and the Nama. In his infamous order General von Trotha commanded that every Herero be shot – with no mercy shown even to women and children.*

*After the battle of Waterberg in 1904, the survivors were forced into the Omaheke desert, where they were denied any access to water sources and were left to die of thirst and starvation. Following the uprisings, the surviving Herero, Nama and Damara were interned in camps and put to forced labour of such brutality that many did not survive.*

*We pay tribute to those brave women and men, particularly from the Herero and the Nama, who fought and suffered so that their children and their children's children could live in freedom. I remember with great respect your ancestors who died fighting against their German*

*oppressors. Even at that time, back in 1904, there were also Germans who opposed and spoke out against this war of oppression. One of them was August Bebel, the chairman of the same political party of which I am a member. In the German parliament, Bebel condemned the oppression of the Herero in the strongest terms and honoured their uprising as a just struggle for liberation. I am proud of that today.*

*A century ago, the oppressors – blinded by colonialist fervour – became agents of violence, discrimination, racism and annihilation in Germany's name. The atrocities committed at that time would today be termed genocide – and nowadays a General von Trotha would be prosecuted and convicted. We Germans accept our historical and moral responsibility and the guilt incurred by Germans at that time. And so, in the words of the Lord's Prayer that we share, I ask you to forgive us our trespasses.*

*Without a conscious process of remembering, without sorrow, there can be no reconciliation – remembrance is the key to reconciliation. 2004 is a year of commemorations but it should also be a year of reconciliation. Today, we honour the dead. Those who fail to remember the past become blind to the present. By remembering the past, we should gain strength for the present and the future.*

## Lampiran 2

### **Pidato Minister of State Cornelia Piper pada 30 September 2011.**

[Cornelia Piper]

*“The transfer of these skulls today to Namibian hands reminds us of a dark chapter in our divided German-Namibian history. This ceremony gives us cause to bring to mind once again the atrocities committed at that time and to recognize the immeasurable suffering of the people affected. We should together seek ways in which our reflections on this sad period can help us foster the present positive, forward-looking approach to relations between our countries and peoples.*

*We Germans acknowledge and accept this heavy legacy and the ensuing moral and historical responsibility to Namibia. The German Bundestag has likewise taken note of this responsibility of Germany’s to Namibia and the resulting special relationship between the two states in two resolutions (in 1989 and 2004). The German Government is fulfilling this duty through particularly close bilateral cooperation – and development cooperation – with Namibia.*

*I would also like to express my own personal deep regret and shame for what was done to the ancestors of the tribal representatives now in Berlin. I pay tribute to all those who died more than a hundred years ago fighting for the autonomy of their peoples. I would now, on behalf of the German Government, like to ask the Herero, Nama and Damara for reconciliation and reach out to the people of Namibia.”*

### Lampiran 3

#### 1. Pernyataan Heiko Maas pada 28 Mei 2021 Terkait Hasil Akhir Perundingan Genosida Herero dan Nama: *Political Apology*

[Heiko Maas]

*“I am pleased and indeed grateful that we have agreed with Namibia on how to deal with the darkest chapter of our shared history. After more than five years, Ruprecht Polenz and his Namibian counterpart Zed Ngavirue were able to conclude the negotiations that they were conducting on behalf of our two Governments and based on the guidance of our two Parliaments. Representatives of the Herero and Nama communities were closely involved in the negotiations on the Namibian side.*

*Our aim was and remains to find a shared path toward genuine reconciliation in memory of the victims. This includes being unreserved and unflinching in naming the events of the German colonial period in what is now Namibia and in particular the atrocities between 1904 and 1908. We will now officially call these events what they are from today’s perspective: genocide.*

*Given Germany’s historical and moral responsibility, we will ask Namibia and the descendants of the victims for forgiveness.*

*As a gesture of recognition of the immeasurable suffering inflicted on the victims, we want to support Namibia and the victims’ descendants with a substantial program to the tune of 1.1 billion euro for reconstruction and development. The communities affected by the genocide will play a key role in shaping and implementing this program. Legal claims for compensation cannot be derived from it.*

*Meaningful reconciliation cannot be decreed from above. It is beyond doubt that the crimes committed during German colonial rule have long been a burden on our relations with Namibia. The past cannot be put to rest. Recognizing our guilt and offering an apology however is an important step to coming to terms with the crimes of the past and shaping the future together.”*

Link video pernyataan Heiko Maas:  
<https://twitter.com/HeikoMaas/status/1398186805648891907?t=2sPkxX1eKMhOrdHq9aG0dA&s=19>

## **2. Pernyataan Wakil Presiden Nangolo Mbumba dalam Merespons *Political Apology* dan Reparasi Jerman**

Link video pernyataan Wakil Presiden Nangolo Mbumba:  
<https://youtu.be/HecuKuUP0ZO>